



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2020 - 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi untuk jangka waktu lima tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 160);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kota Semarang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Semarang.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- b. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan tentang arah kebijakan, strategi pentahapan dan program peningkatan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multi sektoral;
 - b. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
 - c. memberikan panduan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi daerah pangan dan gizi.
- (2) Sistematika Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : RENCANA AKSI MULTISEKTOR

BAB III : KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB V : PENUTUP

- (3) Penjabaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai perangkat daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam peningkatan pangan dan gizi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dilakukan dengan sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kota Semarang.
- (2) Pelaksanaan program-program dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi perlu dukungan pemangku kepentingan dan dukungan kalangan dunia usaha melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- (3) Tata cara partisipasi oleh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2024

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 201

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Kewajiban negara dalam mewujudkan ketahanan pangan mencakup realisasi kedaulatan pangan, kemandirian, ketahanan, keamanan, produksi, cadangan pangan sehingga proses-proses yang membentuk ketersediaan pangan yang aman bagi segenap warga negara. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merumuskan ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi penegasan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia sebagai pelaksanaan *Universal Declaration of Human Right* (1948) dan *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966). Pernyataan pangan sebagai hak asasi manusia dinyatakan pada kesepakatan *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* pada tahun 1996. Deklarasi tersebut memberikan prioritas pada *human right to adequate food* (hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup) dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan ekstrem.

Komitmen negara kita melaksanakan Keputusan *The World Health Assembly* tahun 2012 adalah mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025 terutama 5 sasaran strategis adalah : (1) penurunan 40% prevalensi anak Balita pendek dan sangat pendek; (2) penurunan 50% anemia pada wanita usia subur; (3) penurunan 30% bayi lahir dengan BBLR; (4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50% dan (5) menurunkan dan mempertahankan wasting pada Balita kurang dari 5% (Kemenkes, 2017).

Selanjutnya Agenda 2030 untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals/SDG`s*) yang dirumuskan dalam 17 Agenda dan 168 Tujuan yang akan dicapai secara terukur pada tahun 2030. Secara nasional telah ditetapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pada Tujuan 2 TPB yang menyatakan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Upaya pemenuhan pangan dan gizi dalam pelaksanaan TPB dirumuskan kebijakan sebagai berikut : (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan, (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal), (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan, (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan, (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya, (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan, (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, (11) penyaluran bantuan

pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Kebijakan Pemerintah melaksanakan TPB sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Pangan, bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat tentang pentingnya pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). Capaian ketahanan pangan secara sederhana dapat dicermati dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi erat kaitannya dengan perkembangan penduduk. Salah satu masalah yang tingginya laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, sekitar 1,1 persen per tahun atau 2,5 juta orang, serta perubahan iklim mengancam kemampuan produksi pangan Indonesia, mengakibatkan ketergantungan pada impor terus menerus yang menggerus devisa. Dalam 10 tahun terakhir, ketergantungan terhadap pangan impor sudah mencapai taraf mengkhawatirkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan trend peningkatan, impor pangan pada 2003 tercatat 3,34 miliar dollar AS, namun pada 2013 impor pangan telah mencapai 14,90 miliar dollar AS, atau tumbuh empat kali lipat. Melonjaknya nilai impor tersebut karena produksi pangan di dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) pun terus turun dari waktu ke waktu, yaitu 15,19 persen pada 2003 dan menjadi 14,43 persen pada 2013. Bahkan pada tahun 2014 Majalah *The Economist* menempatkan posisi Indonesia menduduki peringkat ketahanan pangan jauh di belakang Singapura dan negara-negara regional Asia Tenggara lainnya, yang diukur berdasarkan tiga (3) indikator penting yakni : daya beli konsumen, ketersediaan makanan, kualitas dan keamanan makanan.

Komitmen untuk meningkatkan swasembada pangan tercermin dari realokasi anggaran yang lebih fokus pada infrastruktur pangan, seperti pembangunan waduk, bendungan dan jaringan irigasi, dengan menambah alokasi anggaran 2015 melalui APBN-P sebesar Rp 16 triliun,

serta tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian sebesar Rp 4 triliun. Pemerintah memperjuangkan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi seluas 3 juta hektar sawah, serta mempercepat pembangunan 27 bendungan pada tahun 2014, selanjutnya membangun 5 lagi bendungan pada tahun 2015 dengan lokasinya di Aceh, Kudus, NTT dan Kaltim. Tahun 2016 membangun 20 bendungan serta menyiapkan pembukaan areal baru bagi lahan pertanian di luar Jawa dengan target luas sebesar 1 juta hektar. Pembukaan lahan pertanian baru menjadi krusial mengingat sentral produksi pangan terpusat di Pulau Jawa, hampir 60% dari produksi pangan Indonesia berasal dari Jawa dan sumbangan 40% terbesar dari Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur sebagai penyangga pangan utama dengan luas wilayah hanya 2,5% dari luas daratan dan jumlah penduduk 14,8% dari jumlah penduduk Indonesia (2017).

Upaya Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengaturan terhadap kedaulatan pangan di daerah. Beberapa daerah yang tidak memiliki lahan pertanian, memainkan peranan penting yaitu mengatur distribusi pangan, memperkuat kelembagaan pangan dan keamanan pangan bagi masyarakat.

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, (3) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (4) status gizi masyarakat. Sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak-anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin.

Permasalahan pangan merupakan salah satu hal yang menjadi sasaran strategis pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari

produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.

Adapun arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Pada era otonomi daerah, pemenuhan pangan dan gizi menjadi agenda penting pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin harus mendapatkan prioritas pemerintah daerah, agar setiap rumah tangga dalam kondisi tercukupi kebutuhan pangan (*food secure*), terjangkau harganya dan aman untuk dikonsumsi.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan mengamanatkan pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Penyusunan RAD-PG merupakan penjabaran komitmen daerah dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi. Komitmen tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh daerah dan didukung dengan pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam RAD-PG diharapkan dapat terlihat target tahunan yang akan dicapai oleh daerah beserta alokasi anggaran tahunannya sehingga memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018 telah menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Dalam peraturan tersebut telah diatur dan diamanatkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dan diatur mengenai sistematika RAD-PG baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan kebijakan pembangunan pangan dan gizi dalam wujud Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah dengan Pergub Nomor 85 Tahun 2016. Di dalam RAD tersebut ditetapkan target-target yang ingin dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pembangunan pangan dan gizi sampai tahun 2019.

Berdasarkan arahan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kondisi eksisting tentang pangan dan gizi, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD-PG) Kota Semarang. Penyusunan rencana aksi tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan Kota Semarang dalam rangka memenuhi, mewujudkan kedaulatan pangan dan memberikan keterpenuhan gizi di Provinsi Jawa Tengah dan sumbangan menyelesaikan permasalahan nasional. Kota Semarang bukanlah produsen bahan pangan, namun merupakan salah satu pusat perdagangan pangan nasional yang memiliki peran strategis bagi peningkatan pangan gizi nasional melalui manajemen pengelolaan pangan, distribusi dan keterjangkauan serta keamanan pangan yang semakin berkualitas. Pelaksanaan RAD PG Kota Semarang terkait erat arahan dan kebijakan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 terutama menyelesaikan isu strategis pertama yaitu : kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan permasalahan : (1) masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat (pemenuhan dan kualitas pangan dan keterkaitannya); (2) masih tingginya beban pengeluaran warga miskin (untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas). Pelaksanaan RAD PG merupakan pelaksanaan dari Misi ke 1 dalam pembangunan daerah Kota Semarang yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas serta menyelesaikan permasalahan nasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Semarang adalah untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kota Semarang dalam periode tahun 2020-2024 yang tersusun dalam dokumen perencanaan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan guna mewujudkan ketahanan pangan dan

pencapaian status gizi masyarakat di Kota Semarang dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program serta kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral.
2. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Kota Semarang.
3. Menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah di Kota Semarang sehingga dapat menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi, mampu memilih intervensi yang sesuai dengan kondisi dilapangan, serta mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Semarang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

1.4 Capaian Indikator Makro Pembangunan Pangan dan Gizi Kota Semarang

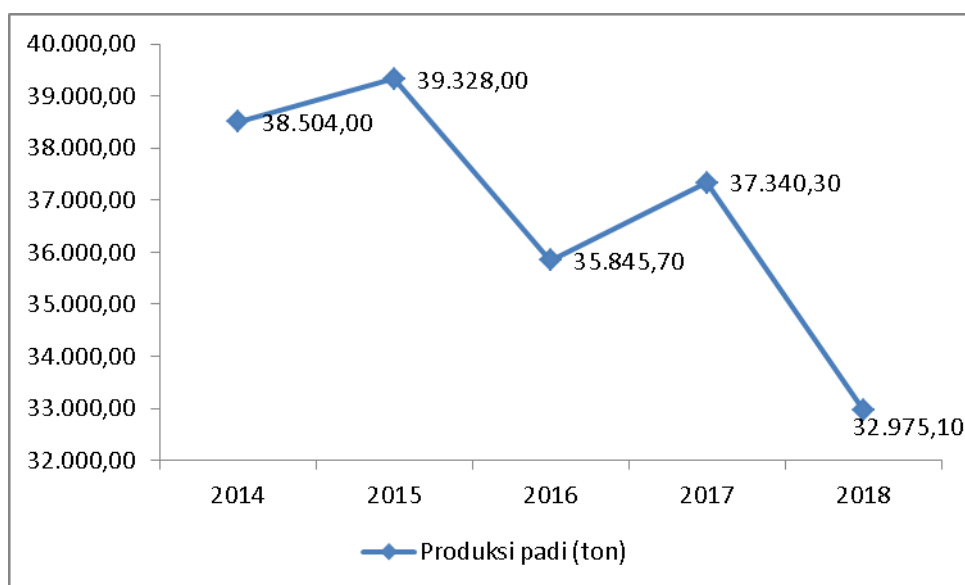
1.4.1 Situasi Pembangunan Pangan

1. Produksi Padi

Padi merupakan komoditas utama tanaman pangan yang memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai makanan pokok, sehingga produksi padi dalam negeri berperan dalam ketahanan dan kemandirian pangan. Komoditas padi memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspek politis, ekonomis, dan kerawanan sosial terkait peran padi sebagai pangan pokok lebih dari 95 persen penduduk Indonesia (Suryana, 2004).

Produksi padi di Kota Semarang kondisinya memiliki kecenderungan menurun. Hal tersebut dilihat dari produksinya yang semakin turun dari tahun ke tahun. Penurunan produksi padi di Kota Semarang cukup signifikan. Pada tahun 2014

produksi padi mencapai 38.504,0 ton, turun menjadi 32.975,10 ton pada tahun 2018.



Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.1.

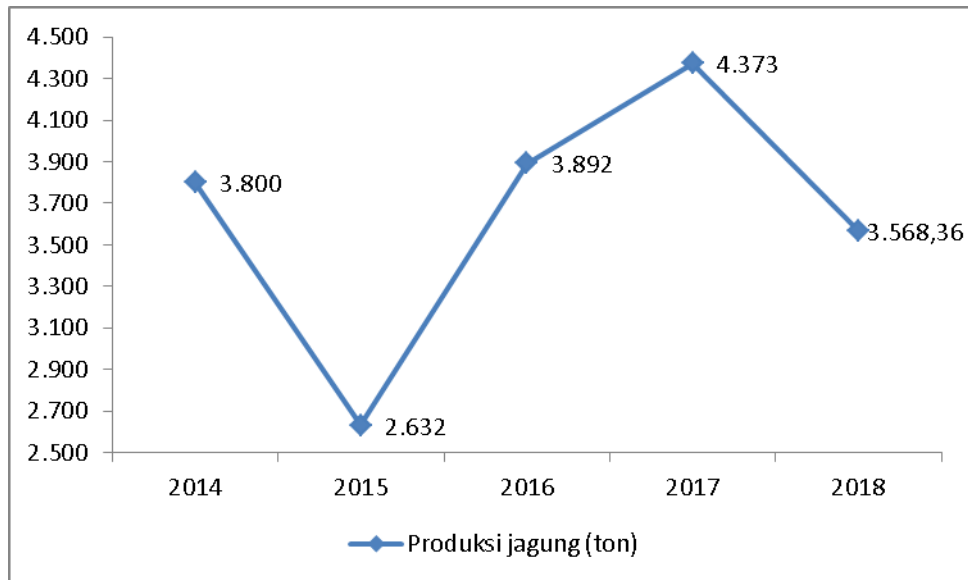
Grafik Produksi Padi di Kota Semarang Tahun 2014-2018

2. Produksi Jagung

Jagung merupakan komoditas pangan utama setelah padi yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian. Pengembangan komoditas ini berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri. Pengembangan jagung dalam skala yang lebih luas dengan produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah.

Komoditas jagung mempunyai fungsi multiguna (4F), yaitu untuk pangan (*food*), pakan (*feed*), bahan bakar (*fuel*), dan bahan baku industri (*fiber*). Dalam ransum pakan ternak, terutama unggas, jagung merupakan komponen utama dengan proporsi sekitar 60%. Diperkirakan lebih dari 58% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk pangan hanya sekitar 30%, dan sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih (Kementan, 2013).

Produksi jagung di Kota Semarang mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2014 produksi jagung sebesar 3.800 ton, menurun menjadi 3.568,36 ton pada tahun 2018.



Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.2.

Grafik Produksi Jagung di Kota Semarang Tahun 2014-2018

3. Produksi Daging

Produk ternak hewani merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi manusia, di Indonesia selain bahan pangan pokok (beras) produk ternak digunakan sebagai lauk dalam sajian makan sehari-hari, bahan pangan hewani merupakan sumber protein penting (selain protein nabati) yang sangat berperan dalam pemenuhan gizi manusia.

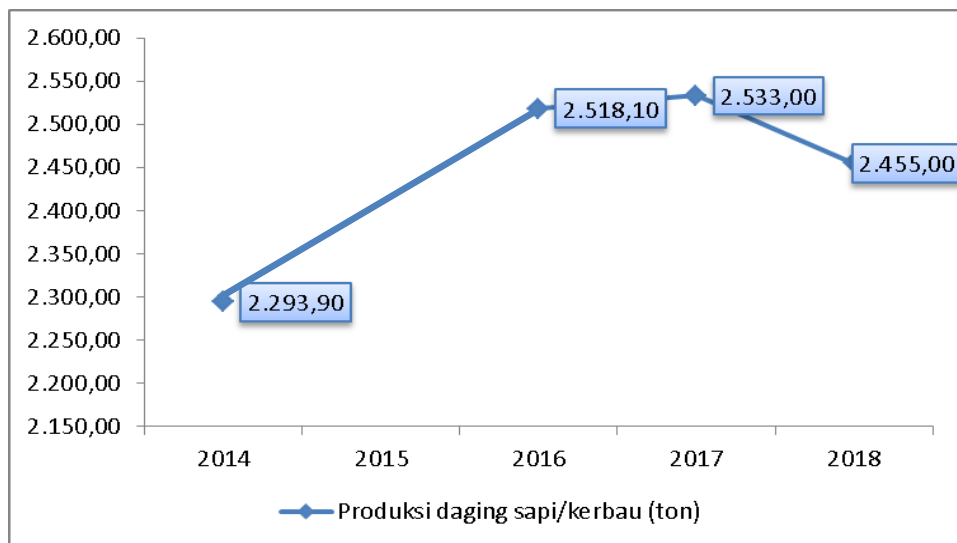
Produk pangan hewani umumnya berupa daging, susu, telur dan ikan yang sangat kaya protein. Protein ini juga sangat kaya asam amino esensial yang sangat sesuai dengan kebutuhan manusia. Produk hewani mempunyai peran yang sangat penting, hal ini berkaitan pada asupan kalori-protein yang rendah pada anak balita menyebabkan terganggunya pertumbuhan, meningkatnya resiko terkena penyakit, mempengaruhi perkembangan mental, menurunkan performs mereka di sekolah dan menurunkan produktivitas tenaga kerja setelah dewasa.

Sebagai pendamping sajian makan sehari-hari, bahan pangan hewani merupakan sumber protein penting (selain protein nabati) yang sangat berperan dalam pemenuhan gizi masyarakat. Secara tradisional, sejak dahulu, masyarakat kita sudah menyandingkan produk pangan hewani ini dalam menu makanan sehari-harinya.

Daging adalah salah satu jenis hasil produk ternak yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai

bahan pangan, daging merupakan sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang cukup lengkap. Dengan meluasnya konsumsi daging, telah banyak bentuk hasil olahan yang berasal dari daging seperti daging sosis, dendeng, abon, kornet dan daging sapi asap serta lain-lain.

Produksi daging di Kota Semarang dari tahun 2014 sampai tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 produksi daging mampu mencapai 2.293,90 ton, meningkat menjadi 2.455,00 ton pada tahun 2018.



Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019

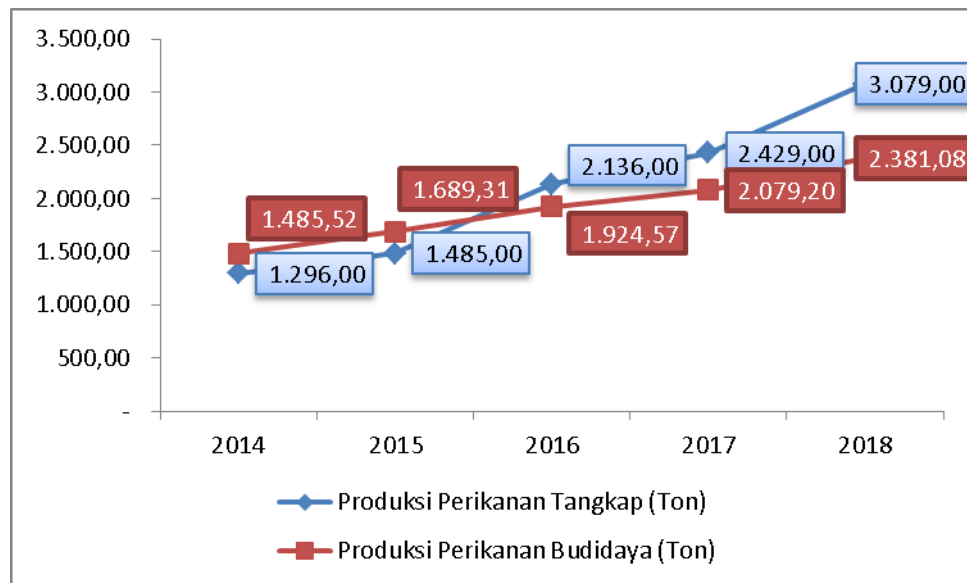
Gambar 1.3.
Grafik Produksi Daging sapi/kerbau di Kota Semarang Tahun 2014-2018

4. Produksi Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan

Ikan adalah bagian dari bahan pangan yang merupakan sumber protein hewani yang sangat berguna untuk kesehatan karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan asam lemak omega-3 serta ikan juga mempunyai daya cerna yang sangat tinggi yaitu hingga 98% yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kecerdasan anak (Hadju dkk, 1998). Untuk memenuhi ketersediaan pangan ikan, dapat diperoleh melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Produksi perikanan tangkap di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2014-2018 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap sebanyak 1.296,00 ton, pada tahun 2018 meningkat menjadi 3.079,00 ton. Sedangkan untuk perikanan budidaya, produksinya meningkat

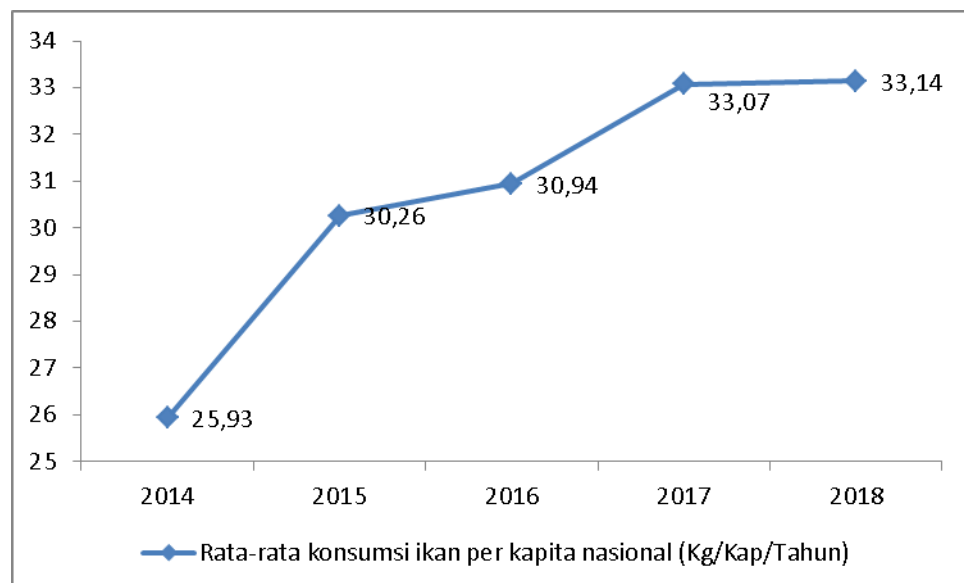
dari 1.485,52 ton pada tahun 2014 menjadi 2.381,08 ton.pada tahun 2018.



Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.4.
Grafik Produksi Perikanan di Kota Semarang Tahun 2014-2018

Tingkat konsumsi ikan penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan. Konsumsi ikan pada tahun 2014 sebesar 25,93 kg/kap/tahun meningkat menjadi 33,14 kg/kapita/tahun pada tahun 2018.



Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2019

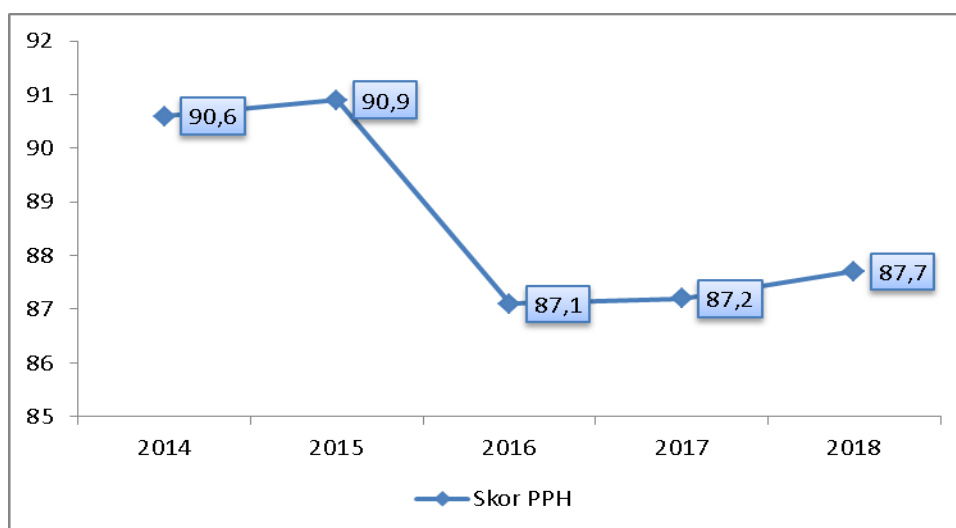
Gambar 1.5.
Grafik Rata-rata Konsumsi Ikan Per Kapita di Kota Semarang Tahun 2014-2018

5. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat

ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Skor PPH Kota Semarang menunjukkan penurunan, dari 90,6 pada tahun 2014 menjadi 87,7 pada tahun 2018.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.6.

Grafik Skor PPH Kota Semarang Tahun 2014-2018

Dari sisi komposisi, konsumsi masyarakat Kota Semarang sudah cukup berimbang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat konsumsi pangan padi-padian, pangan hewani, serta sayur dan buah yang ketimpangannya tidak terlalu besar. Secara lengkap Skor PPH berdasarkan kelompok pangan dari tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Tabel 1. 1

Skor Pola Pangan Harapan Berdasarkan Kelompok Konsumsi di Kota Semarang Tahun 2014-2018

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017	2018
Padi-padian	25	25	24,7	25	25
Umbi-umbian	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0
Pangan hewani	19,3	19,6	18,2	17,7	17,2
Minyak dan Lemak	5,00	5,01	5,00	5,00	5,00
Buah/Biji berminyak	1	1	1	1	1
Kacang-kacangan	10	10	10	10	10
Gula	2,2	2,1	1,9	2	1,7
Sayur dan buah	26,1	26,1	24,3	24,6	27,8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2019

6. Perhitungan kebutuhan pangan di Kota Semarang

Rata-rata konsumsi beras perkapita di Kota Semarang sebanyak 101,6 kg/tahun, konsumsi jagung perkapita sebesar 10,9 kg/tahun, sementara konsumsi ikan perkapita sebanyak 33 kg/tahun. Berdasarkan hasil produksi pangan maka untuk kebutuhan beras baru terpenuhi sebesar 13,62%, hal ini menunjukkan jika untuk pemenuhan beras di Kota Semarang masih tergantung beras dari wilayah sekitarnya. Produksi jagung di Kota Semarang baru memenuhi sebesar 0,22% kebutuhan, hal ini juga menunjukkan dalam memenuhi kebutuhan jagung di Kota Semarang masih tergantung dengan wilayah sekitarnya. Produksi Ikan baru memenuhi sebesar 6,40% kebutuhan. Hal ini menunjukkan dalam memenuhi kebutuhan ika di Kota Semarang masih tergantung dengan wilayah sekitarnya. Perhitungan kebutuhan pangan di Kota Semarang dapat disampaikan sebagai berikut

Tabel 1. 2
Perhitungan Kebutuhan Pangan Di Kota Semarang

No	Bahan Pangan	Produksi (ton)	Rata-rata konsumsi/per kapita/tahun (kg)	Perkiraan Kebutuhan (ton)	Keterangan
1	Beras	37.340,30	101,6	178.114,15	Produksi memenuhi sebesar 13,62%
2	Jagung	4.372,5	10,9	19.108,70	Produksi memenuhi kebutuhan sebesar 0,22%
3	Ikan	5.460,08	33	57.852,03	Produksi memenuhi kebutuhan sebesar 6,40%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2019

1.4.2 Situasi Pembangunan Gizi

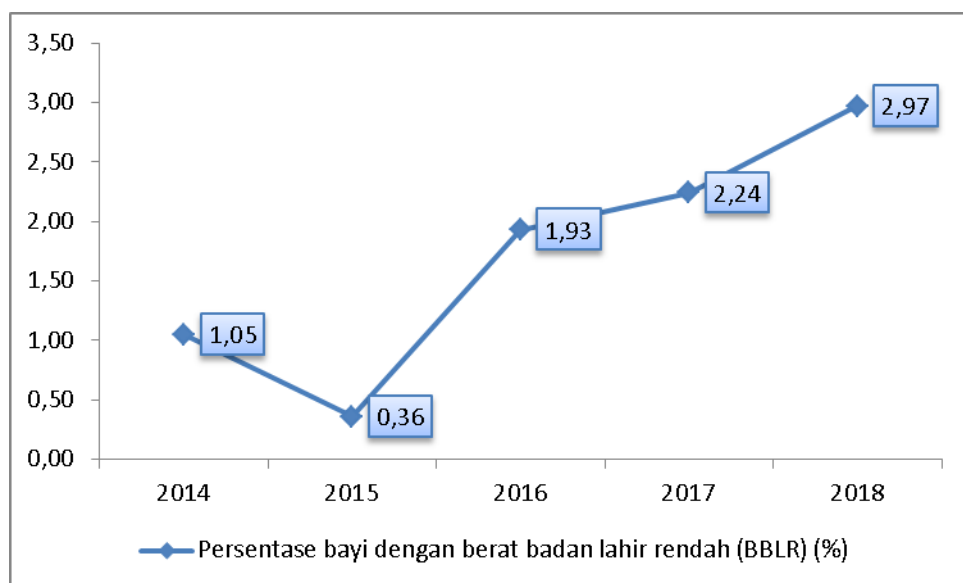
1. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)

Berat lahir bayi mencerminkan hasil perkembangan dalam kandungan dan kecukupan nutrisi bayi saat dilahirkan. Bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2.500gr (2,5 kg). Beberapa klasifikasi lain

untuk berat lahir rendah adalah: berat lahir sangat rendah jika di bawah 1,5 kg, dan berat lahir rendah ekstrem jika di bawah 1 kg.

Berat lahir rendah tidak hanya mempengaruhi kondisi bayi saat dilahirkan tetapi juga kesehatan bahkan kelangsungan hidup bayi. Pada umumnya, bayi yang dilahirkan prematur atau kurang dari 37 minggu usia kandungan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal. Di samping jangka waktu kehamilan, berat lahir bayi ditentukan oleh beberapa faktor yang pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu dan kesehatan saat kehamilan.

Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah di Kota Semarang dari tahun 2014-2018 kondisinya fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2015 merupakan tahun terendah BBLR dengan capaian sebesar 0,36%. Setelah tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, capaian pada tahun 2018 sebesar 2,97%. Hal demikian maka dapat disimpulkan persentase bayi dengan berat badan lahir rendah di Kota Semarang semakin meningkat dengan tren yang negatif.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019

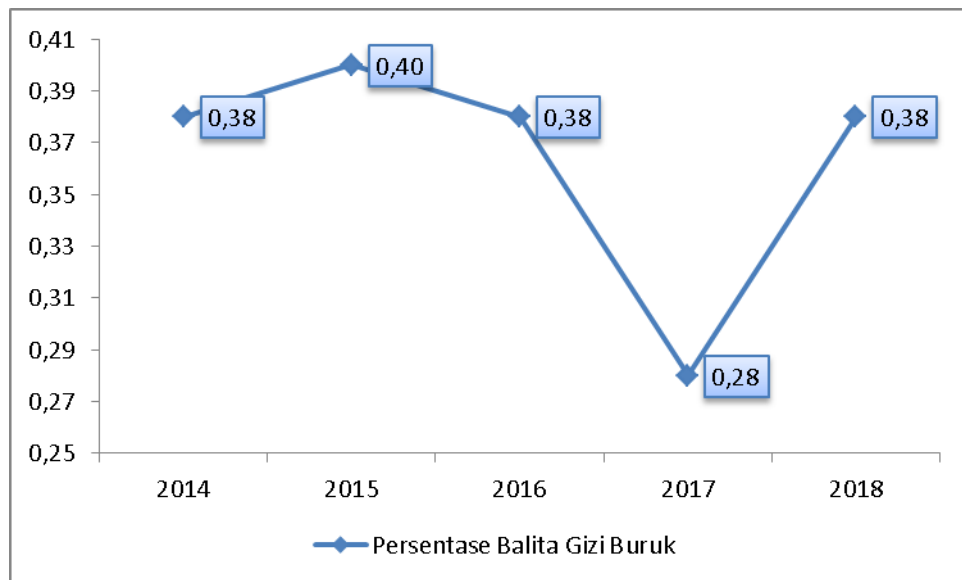
Gambar 1.7.
Grafik Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di Kota Semarang Tahun 2014-2018

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun

kelebihan nutrisi. Pada dasarnya gizi buruk bisa diartikan sebagai kondisi dimana seseorang kekurangan asupan yang mengandung energi dan protein. Padahal protein dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan sel-sel baru. Selain itu, asupan ini juga turut membantu proses perbaikan sel-sel yang rusak. Gizi Buruk kebanyakan menyerang anak-anak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sebanyak 54% kematian bayi dan balita disebabkan kondisi gizi buruk. Bahkan risiko kematian anak dengan gizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan dengan anak normal.

Persentase Balita Gizi buruk di Kota Semarang pada tahun 2014-2018 kondisinya fluktuatif. Capaian tahun 2017 merupakan capaian terbaik dalam kurun waktu 2014-2018 yaitu sebesar 0,28%, sementara capaian tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,38%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.8.
Grafik Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Semarang Tahun 2014-2018

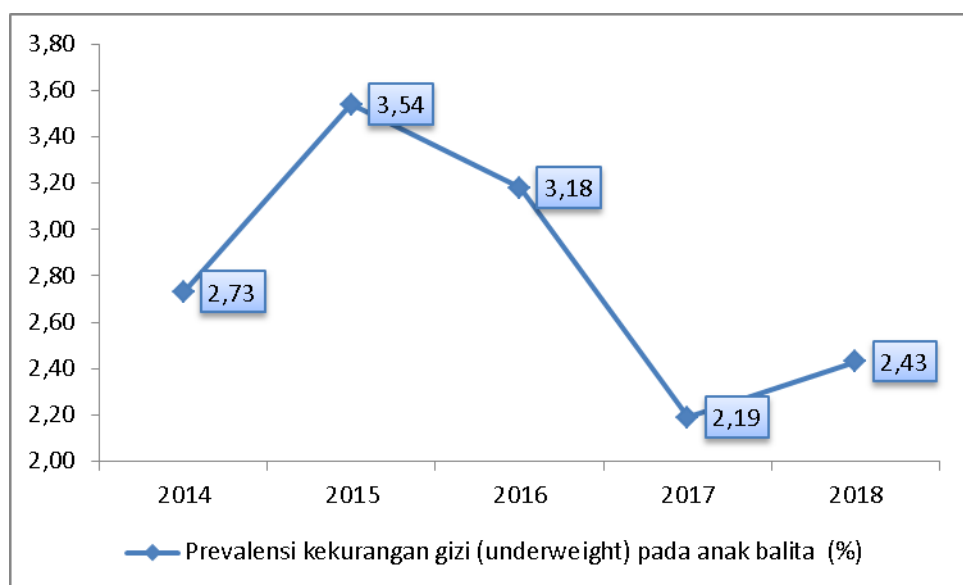
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)

Angka anak-anak yang menderita kekurangan gizi di Indonesia ternyata masih tinggi bila dibandingkan angka ambang batas yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan tingginya angka kekurangan gizi itu tampak pada tiga kategori kekurangan gizi. Pada kategori kekurangan gizi menurut indeks berat badan

per usia, angkanya mencapai 17%. Padahal ambang batas angka kekurangan gizi WHO itu 10%.

Balita merupakan kelompok umur yang rentan terhadap kelainan gizi karena pada saat ini mereka membutuhkan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu juga balita sangat pasif terhadap asupan makannya sehingga balita akan sangat bergantung pada orang tuanya (Santoso, S, Lies, 2004; Aritonang, 2006). Pada balita yang kekurangan gizi akan terjadi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan kerentanan terhadap suatu penyakit diantaranya adalah kurang kalori dan protein (KKP), anemia, xerophthalmia serta gizi kurang juga meningkatkan keparahan dan durasi penyakit yang mengakibatkan risiko kematian (Notoatmodjo, 2011)

Sementara itu prevalensi kekurangan gizi pada anak balita di Kota Semarang memiliki kecenderungan menurun. Capaian tahun 2014 sebesar 2,73% menurun menjadi 2,43% pada tahun 2018. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,54% dan capaian terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,19%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.9.
Grafik Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Kota Semarang Tahun 2014-2018

4. Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) (%)

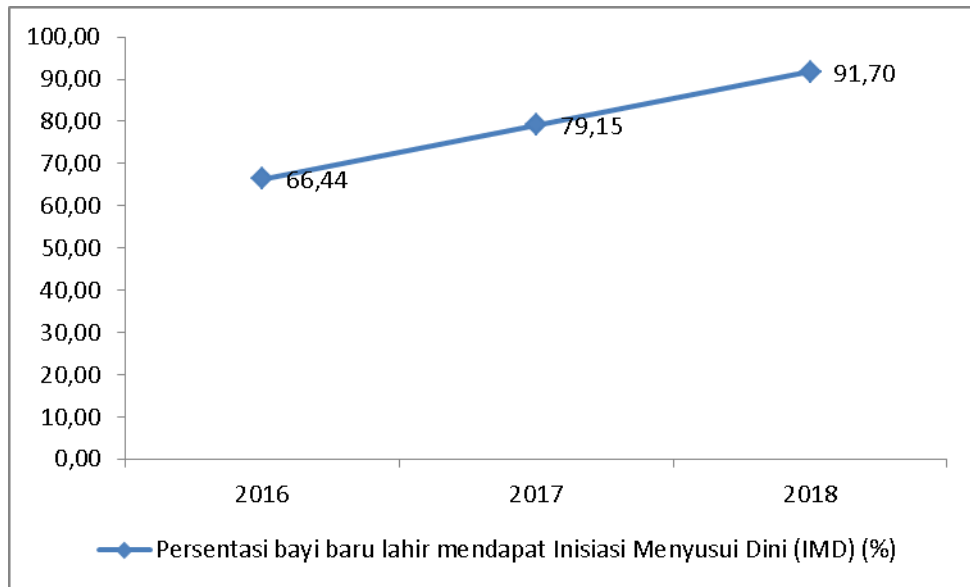
Inisiasi Menyusui Dini atau IMD adalah memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit sampai satu jam setelah bayi lahir. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), di Indonesia angka IMD mengalami peningkatan, yaitu dari 29,3% pada tahun 2010 menjadi 34,5% pada tahun 2013. Menurut riset ini pula, kebanyakan proses inisiasi menyusui dini ini terjadi antara 1-6 jam setelah proses kelahiran.

Prosedur inisiasi menyusui dini sebenarnya sederhana, bayi hanya perlu diletakkan di dada ibu, tentunya setelah bayi dicek keadaannya dan dibersihkan. Bayi ditempelkan ke dada ibu dalam keadaan telanjang sehingga terjadi interaksi dari kulit ke kulit atau *skin to skin contact*. Jangan langsung meletakkan mulut bayi tepat di puting ibu, beri jarak, biarkan bayi mencari sendiri dan mendekati puting.

Selama proses ini berlangsung, disarankan untuk tidak membantu bayi, atau sengaja mendorong bayi mendekati puting ibu. Biarkan keseluruhan proses interaksi antara ibu dan bayi yang baru lahir berjalan secara alami. Proses inisiasi menyusui dini dapat berlangsung selama bayi masih mengisap puting ibu dan selesai ketika bayi melepaskan hisapan dari puting ibu.

Manfaat inisiasi menyusui dini dan kontak antar kulit bagi ibu dan bayi:

- a. Membuat ibu lebih tenang dan bahagia.
- b. Meningkatkan motivasi ibu untuk menyusui.
- c. Mengurangi rasa panik pada bayi baru lahir.
- d. Meningkatkan fungsi imun bayi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.10.

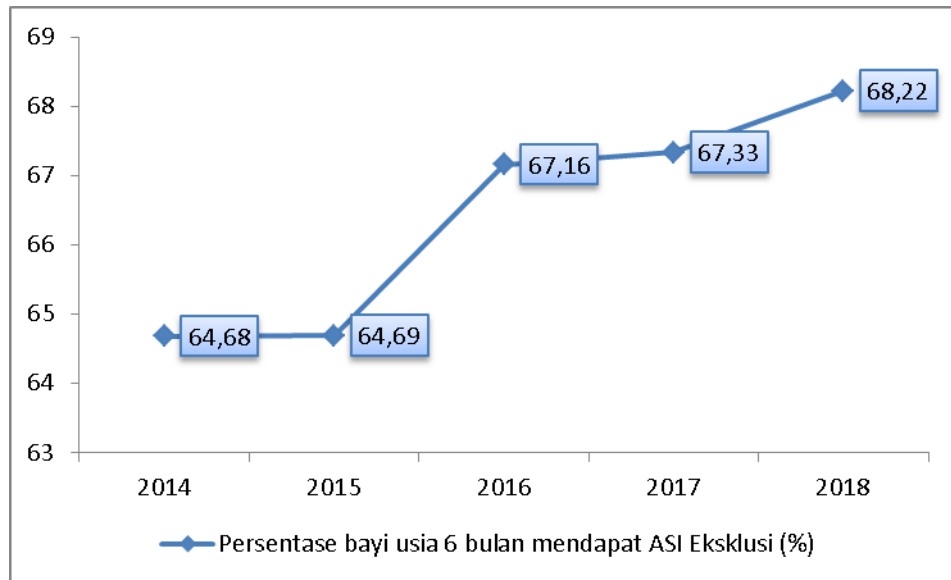
Grafik Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Semarang Tahun 2016-2018

5. Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif (%)

ASI eksklusif diberikan sejak bayi lahir ke dunia hingga berusia enam bulan. Selama periode tersebut, disarankan untuk hanya memberi bayi ASI, tanpa tambahan asupan apa pun. Sebab, ada banyak manfaat ASI eksklusif yang bisa didapatkan oleh bayi.

Belum ada asupan yang lebih baik untuk bayi selain ASI. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi, seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Komposisinya pun lebih mudah dicerna ketimbang susu formula.

Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 64,68% meningkat menjadi 68,22% pada tahun 2018.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.11.
Grafik Persentase Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2014-2018

6. Prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (%)

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Banyak yang tak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah pertumbuhan si kecil. Apalagi, jika stunting dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat. Pasalnya stunting adalah kejadian yang tak bisa dikembalikan seperti semula jika sudah terjadi.

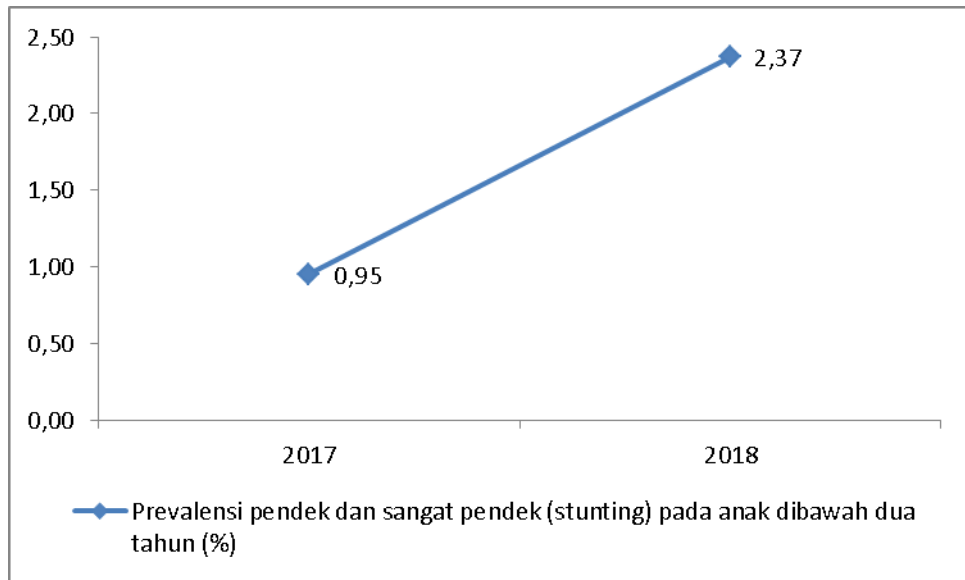
Kondisi ini disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi anak, bahkan sejak ia masih di dalam kandungan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa 20% kejadian stunting sudah terjadi ketika bayi masih berada di dalam kandungan. Kondisi ini diakibatkan oleh asupan ibu selama kehamilan kurang berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran.

Selain itu, stunting juga bisa terjadi akibat asupan gizi saat anak masih di bawah usia 2 tahun tidak tercukupi. Entah itu tidak diberikan ASI eksklusif ataupun MPASI (makanan pendamping ASI) yang diberikan kurang mengandung zat gizi yang berkualitas.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/ SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek). Balita pendek (*stunting*) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005, nilai z-scorenya kurang dari -2SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai z-scorenya kurang dari -3SD.

Data *Global Nutrition Report 2016* mencatat jumlah balita *stunting* sebanyak 36,4 persen dari seluruh balita di Indonesia. *Stunting* mencerminkan kekurangan gizi kronis selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Umumnya bagi seorang anak yang mengalami kurang gizi kronis, proporsi tubuh akan tampak normal, namun kenyataannya lebih pendek dari tinggi badan normal untuk anak-anak seusianya.

Prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) di Kota Semarang tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017. Jika pada tahun 2017 terdapat 0,95% baduta *stunting*, maka pada tahun 2018 meningkat menjadi 2,37%. Capaian tersebut harus menjadi perhatian stakeholder terkait agar tidak semakin meningkat.

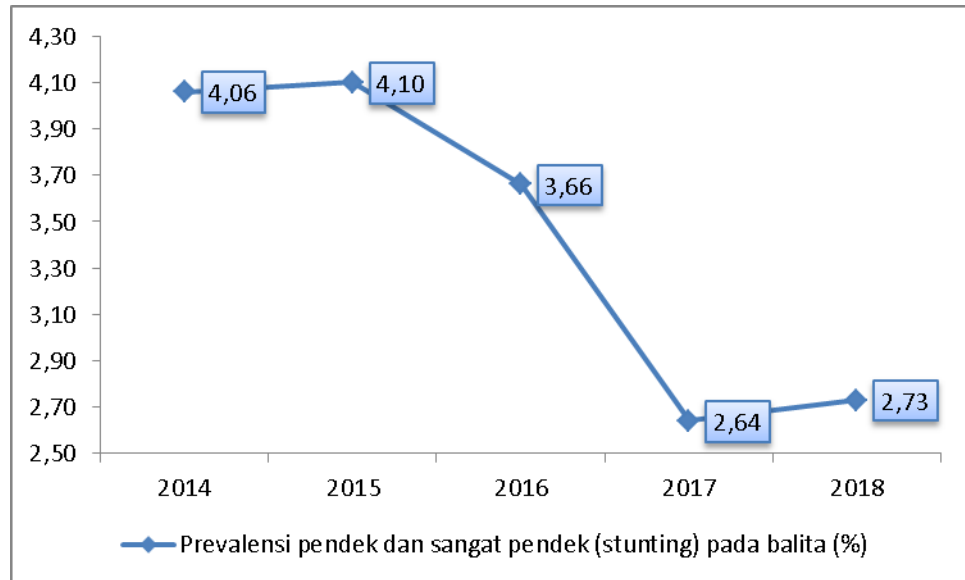


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.12.

Grafik Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak dibawah dua tahun di Kota Semarang Tahun 2017-2018

Sementara itu Prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada balita di Kota Semarang tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014. Jika pada tahun 2014 terdapat 4,06% balita stunting, maka pada tahun 2018 turun menjadi 2,73%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2019

Gambar 1.13.

Grafik Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita di Kota Semarang Tahun 2014-2018

1.4.3 Jaringan Pemasaran Bahan Pokok Utama di Kota Semarang

Potensi jejaring ketahanan di Kota Semarang, terlihat dari masing-masing kecamatan ketersediaan dan jaringan pemasaran bahan pokok utama di Kota Semarang. Hal tersebut ditunjukkan melalui uraian berikut di bawah ini.

1. Wilayah Kecamatan Semarang Barat

Ketersediaan jejaring pangan di Kecamatan Semarang Barat tercatat ada empat penyalur barang pokok kebutuhan masyarakat. Tiga diantaranya yaitu Agen Gudang Beras 9, Grosir Pusat Beras, Agen Pak Tani sebagai penyedia produk beras. Sementara itu satu agen jaringan pangan yaitu PT. Primatama Karya Persada sebagai tempat pemotongan hewan. Jaringan pangan terdaftar di Kecamatan Semarang Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Semarang Barat

No	Nama	Alamat	Produk
1	Agen Gudang Beras 9	Jl. Anjasmoro Raya 37	Beras
2	Grosir Pusat Beras	Puri Anjasmoro B1/22	Beras
3	Agen Pak Tani	Jl. Abdulrahaman Saleh 189	Beras
4	PT. Primatama Karya Persada	Jl. Kenconowungu Semarang	Rumah potong ayam

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

2. Wilayah Kecamatan Semarang Selatan

Pada wilayah Kecamatan Semarang Selatan, jaringan distribusi bahan pokok utama tercatat di 7 agen pangan. Dari ketujuh agen bahan pangan tersebut memiliki produk Beras dengan volume pasokan 80 ton, ubi kayu sebesar 0,1 ton, daging ayam sebesar 2 ton, tepung sebesar 15 ton, telur sebesar 15 ton dan daging sapi sebesar 3 ton. Ketujuh agen tersebut tercatat berdomisili di pasar peterongan sebanyak 4 agen pangan, di Jl. Suyudono Bulustalan sebanyak 1 agen dan di Pasar Bulu sebanyak 1 agen.

Jika melihat produk yang masuk, pasokan bahan pangan untuk ketujuh agen jaringan pangan berasal dari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Sukoharjo, Weleri, Demak, Boyolali, Klaten, Kudus dan beberapa wilayah dari Jawa Timur. Area tujuan pemasaran dari ketujuh agen jaringan pangan tersebut adalah Kota Semarang dan sekitarnya. Ketersediaan jaringan distribusi pangan di wilayah Kecamatan Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Semarang Selatan

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume Pasokan (Ton)
1	Suwarno	Ps Peterongan	Ubi Kayu	Gunungpati, Kendal	0,1
2	CJDW	Ps Peterongan	Daging Ayam	Sukoharjo, Weleri	2
3	Pak Dadar	Ps Peterongan	Beras	Demak, Karang Gede, Boyolali	12
4	Lomo	Ps Peterongan	Beras	Pati, Purwodadi	8
5	Toko Mulyo/ Arta	Jl Suyudono, Bulustalan	Beras	Demak, Klaten,	60
			Tepung	Jawa Timur	15
			Telur	Boja, Gunungpati	15
6	Kabluk	Ps Bulu	Daging Sapi	Kudus, Ambarawa	3
7	Grosir Makmur Jaya	wonodri			

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

3. Wilayah Kecamatan Semarang Timur

Wilayah Kecamatan Semarang Timur memiliki titik jaringan pangan tercatat mencapai 21 unit usaha. Jaringan ini terdapat di Jl. Dr Cipto, Jl. Dargo, Jl. Musi Raya dan di Ciliwung Raya. Jaringan distribusi pangan paling mendominasi di Jl. Dargo. Produk yang disediakan oleh ke 21 unit jaringan pangan meliputi gula pasir, beras, minyak goreng curah dan terigu. Semua produk di atas dipasarkan semuanya di Kota Semarang dengan total kapasitas kesediaan meliputi gula pasir sebanyak 6 ton, minyak goreng curah sebanyak 2 ton, beras sebanyak 45 ton dan tepung terigu sebanyak 6 ton.

Pemasok barang kebutuhan utama di wilayah Kecamatan Semarang Timur antara lain dari wilayah Weleri, Delanggu, Demak, Klaten dan Pati. Selain dari daerah luar, terdapat juga bahan pokok utama yang pasokannya melalui pelabuhan, PT BES Semarang dan perusahaan tepung Sriboga di Kota Semarang. Selengkapnya mengenai ketersediaan dan jaringan distribusi pangan di Kecamatan Semarang timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 5
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Semarang Timur

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume (Ton)
1	Inti Kurnia	Jl. Dr.Cipto 86	Gula pasir	Pati, Weleri	3
2	Ambarawa	Jl. Dargo	Minyak goreng Curah	Pelabuhan	1
3	Sumatra Jaya	Jl. Dargo 49 TLP.3520140	Minyak goreng Curah	PT (BES) Semarang	1
5	Monodadi	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	2
7	Sugianto	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	4
8	Sribumi	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	1
11	Budi	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	2
12	Tjipto Kencana	Dr. Cipto 67	Gula pasir, Terigu	Pati, Weleri	3 3
13	Andreas Parjono	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	4
14	Agung Silversten	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	3
15	Yanto	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	4
16	Eliwati	Psr.Dargo	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	3
17	Dua Putri	Jl. Musi raya	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	1
18	Sunter Mas	Ciliwung Raya	Terigu	SRIBOGA Semarang	3
	Ahmadi Nomo	Psr.Dargo	Beras		
	Ahmadi	Psr.Dargo	Beras		
	Toko 42	Psr.Dargo	Telur		
	Samuel	Psr.Dargo	Telur		

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

4. Wilayah Kecamatan Semarang Utara

Untuk wilayah Kecamatan Semarang Utara, tercatat memiliki jaringan distribusi pangan utama di 13 unit usaha pangan. Jumlah tersebut terletak di Jl.M.Supardi, Pasar Rejomulyo, Jl. Layur, Kuningan dan Purwosari. Produk yang disediakan meliputi gula pasir, minyak goreng curah, beras dan ikan asin. Bahan pangan utama tersebut secara keseluruhan dipasarkan untuk wilayah Kota Semarang dengan kapasitas ketersediaan total 9 ton untuk gula pasir, 210 ton untuk minyak goreng curah, 23 ton untuk beras dan 0,11 ton untuk ikan asin.

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Semarang utara berasal dari Rembang, Tuban,

Demak, Boyolali, Damaran dan Grobogan. Paling jauh pasokan berasal dari Kalimantan Selatan untuk minyak goreng curah. Sementara itu terdapat pula pasokan dari perusahaan pangan yaitu dari CV YUDIRA. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di wilayah Kota Semarang, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Semarang Utara.

Tabel 1. 6
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Semarang Utara

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume (Ton)
1	Wilman	Jl.M.Supardi no.8 TLP.3554503	Minyak oring Curah	Kalimatan Selatan	100
2	Rozak	Psr. Rejomulyo	Ikan Asin	Rembang, Tuban, Demak	0,04
3	Sinar Mas	Jl. M. Supardi	Minyak oring Curah	Kalimatan Selatan	100
4	Harti	Psr. Rejomulyo	Ikan Asin	Rembang, Tuban, Demak	0,04
5	Aminah	Psr. Rejomulyo	Ikan Asin	Rembang, Tuban, Demak	0,03
6	Barokah/Umi	Jl. Layur	Beras	Boyolali, Jawa Timur	10
7	Harsono	Jl. Kakap	Beras	Demak	1
8	Yanto	Kuningan	Beras, Minyak, Gula	Delanggu, Semarang	3
9	Yani	Kuningan	Beras, Minyak, Gula	CV Yudira	5
10	Nur	Kuningan	Beras, Minyak, Gula	Demak	1
11	Andi	Kuningan	Beras, Minyak, Gula	Damaran	1
12	Toko Dian	Purwosari	Beras	Purwodadi	1
13	Toko Barokah	Purwosari	Beras	Demak	1

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

5. Wilayah Kecamatan Semarang Tengah

Jaringan pangan di wilayah Kecamatan Semarang Tengah, tercatat memiliki 9 unit agen distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Jl. Beteng, Gang Besen, Jl. Wotgandul, Jagalan, Damaran, Pekunden, Jl. Bima Raya dan Jl. Indraprasta. Produk

yang disediakan meliputi gula pasir sebanyak 15 ton, beras sebanyak 15 ton, terigu sebanyak 40 ton, kedelai sebanyak 5 ton dan sembako.

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Semarang Tengah berasal dari Rembang, Magetan, Demak, Wonosobo, Kendal dan Klaten. Paling jauh pasokan berasal dari India untuk produk kedelai. Sementara itu terdapat pula pasokan dari perusahaan pangan yaitu dari PT. Sriboga. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di wilayah Kota Semarang, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

Tabel 1. 7
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Semarang Tengah

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume (Ton)
1	Santoso Abr	Jl. Beteng 104	Gula Pasir	Pati	10
2	Nawa Panduta	Jl. Gg. Besen 67 TLP.3546931	Terigu	Sariboga Semarang	20
3	Tri Jaya	Jl. Wotgandul Dlm No.12A (024) 3518482	Terigu	Sariboga Semarang	20
4	Rejo Makmur	Beteng 88	Gula Pasir, Terigu	Sariboga Semarang	Terigu (3), Beras (5)
5	CV Elis Jaya	Jagalan	Beras	Delanggu, Klaen, Demak	2
6	Naha Jaito	Damaran G15	Kedelai	India, Wonosobo, Kendal, Klaten	5
7	Tri Jaya	Pekunden	Sembako		2
8	laksana	Jl. Bima Raya	Beras	Pasar Johar	5
			Gula Pasir	Pasar Johar	5
9	Sumber Lumbung	Jl. Indraprasta	Beras	Rembang, Magetan	3

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

Selain jaringan pangan di atas, di wilayah Kecamatan Semarang Tengah juga tercatat masih ada beberapa jaringan pangan yang menyediakan bawang merah, cabe, kedelai, jagung, kacang tanah, daging sapi dan beras. Ada 8 agen yang menyediakan barang pokok tersebut dengan 7 agen pangan berada di Pasar Johar dan 1 agen pangan di Jl. Kentangan.

Tabel 1. 8
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Semarang Tengah dengan Kapasitas Volume Rendah

No	Nama	Alamat	Produk
1	H.Sulardi	Psr. Johar	Bwg.merah
2	Sugiyo	Psr. Johar	Cabe
3	Ratmi	Psr. Johar	Kedele, Jagung, Kacang Tanah
4	Bu Ruli	Psr. Johar	Daging Sapi
5	Heru	Psr. Johar	Telur
6	Yanti	Psr. Johar	Telur
7	Kisdi	Psr. Johar	Telur
8	Kentangan 67	Jl. Kentangan No 67	Beras

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

6. Wilayah Kecamatan Pedurungan

Di wilayah Kecamatan Pedurungan, tercatat memiliki 14 unit agen distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Pasar Penggaron/RPU, Jl. Fatmawati, wolter monginsidi, pasar Pedurungan dan di Jl. Brigjen Sudiarto. Produk yang disediakan diperkirakan antara lain Gula pasir 2 ton, Beras 62,8 sebanyak ton, Terigu 2,7 sebanyak ton, Daging ayam sebanyak 5 ton, Minyak sebanyak 1 ton dan Telur sebanyak 0,4 ton.

Ketersediaan bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Pedurungan berasal dari Boyolali, Kendal, Weleri, Delanggu, Klaten, Demak, Pelabuhan, Pati, Gubug, Dargo dan Solo. Sementara itu terdapat pula pasokan pangan paling jauh yaitu dari Cilegon untuk tepung terigu dan beras dari Jawa Timur. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di wilayah Kota Semarang, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Pedurungan.

Tabel 1. 9
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Pedurungan

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume (Ton)
1	Abror	Pasar Penggaron/ RPU	Daging ayam	Boyolali, Kendal, Weleri	3
2	Dela Mas	Jl. Fatmawati	Sembako	Delanggu, Klaten, Demak, Pelabuhan, Pati	Beras(2), Minyak(1), Gula(2)
3	Indri	RPU	Daging ayam	Boyolali, Kendal, Weleri	3
4	Berkat	Wolter	tepung	Cilegon	2

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume (Ton)
	Lestari	Monginsidi	terigu		
5	Sunyadi	Ps Pedurungan	Beras	Delanggu, Klaten, Demak	2
6	Supriyanto	Ps Pedurungan	Beras	Demak	7,5
7	Toko Jaya	Brigjen Sudiarto 479	Beras	Klaten	0,5
			Telur	Boyolali	0,4
			TERIGU	Gubug	0,7
8	Mursih	Ps Pedurungan	Beras	Dargo	0,8
9	Rejeki	Wolter Monginsidi	Beras	Demak, Solo, Jawa Timur	50
10	Grosir Bintang Jaya	Jl. Arteri Soekarno Hatta	Beras		
11	Grosir Sahabat	Jl. Arteri Soekarno Hatta	Beras		
12	Grosir Saeran	Jl. Gajah raya	Beras	Gayamsari	
13	Toko Surya Jaya	Jl. Majapahit Pedurungan	Telur		
14	Tri Joko	Pasar Penggaron	Daging ayam		

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

7. Wilayah Kecamatan Gayamsari

Jaringan pangan di wilayah Kecamatan Gayamsari, tercatat memiliki 18 unit agen distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Jl. Pasar gayamsari, MAJT, Medoho, Penggaron, Kanguru dan Pusposari. Produk yang disediakan meliputi Daging sapi sebanyak 0,1 ton, Kacang tanah sebanyak 0,05 ton, Kedelai sebanyak 0,75 ton, Jagung sebanyak 0,02 ton, Beras sebanyak 14,15 ton, Terigu sebanyak 1 ton, daging ayam sebanyak 0,35 ton, Minyak sebanyak 1 ton, Telur sebanyak 1,01 ton, Cabe sebanyak 6 ton, Bawang merah sebanyak ton dan ayam potong sebanyak 2,25 ton.

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Gayamsari berasal dari Sukoharjo, Weleri, Kendal, Kediri, Madura, Pelabuhan, Klaten, Demak, Boyolali dan Kudus. Sementara itu terdapat pula pasokan dari perusahaan pangan yaitu dari PT. Sriboga, dengan distribusi terjauh dari India. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di wilayah Kota Semarang, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Gayamsari.

Tabel 1. 10
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Gayamsari

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume (ton)
1	Surya Jaya	PS Gayamsari	Telur	Sukoharjo, Weleri, Kendal	0,02
2	Sugiyono	MAJT	Cabe	Kediri, Madura, Kendal	2
3	Sinar Dua	MAJT	Tepung, Minyak, Beras	Sariboga, Pelabuhan, Klaten, Demak	Tepung(1), Minyak(1), Beras (2)
4	Suyadi	MAJT	Cabe	Kediri, Madura, Kendal	3
5	Sulandi	MAJT	Bawang merah	Brebes, Import	4
6	Bowo	MAJT	cabe	Kediri, Madura, Kendal	3
7	Ratmi	MAJT	kacang tanah, kedelai, jagung	Boyolali, India, Demak, Salatiga	Kacang (0,05), Kedelai (0,075), Jagung (0,02)
8	Fatimah	MAJT	Daging Sapi	Ampel Boyolali	0,1
9	Lin	MAJT	Daging Ayam	Rpu	0,3
10	Sumarni	MAJT	Daging Ayam	Rpu	0,05
11	Mugi Berkah	Medoho	Beras	Kudus	3
12	Segitiga Merah	Jl. Penggaron	Ayam Potong	Semarang	0,25
13	Rahayu	Semarang	Beras	Demak, Kudus, Klaten	0,25
14	Iwan	Kanguru	Beras	Demak, Kudus, Delanggu	4
15	Ardan	Kanguru	Beras	Demak	0,9
16	Berkah Ngadimin	Kanguru	Beras	Semarang	2
			Telur	Semarang	0,09
17	Tanah Air	Pusposari VI	Beras	Semarang	4
18	Sulaimanah	Semarang	Ayam Potong	Semarang	2

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

8. Wilayah Kecamatan Genuk

Jaringan pangan di wilayah Kecamatan Genuk, tercatat memiliki 5 unit agen distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Kaligawe, Jl. Genuk Sari dan di Jl. Raya Genuk Kudu. Produk yang disediakan meliputi gula pasir sebanyak 27,5 ton, gula jawa sebanyak 8 ton, beras sebanyak 95 ton, terigu sebanyak 26,5 ton dan telur sebanyak 6 ton.

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Genuk berasal dari Demak, Boyolai, Semarang, Purwodadi dan Boja. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di wilayah Kota Semarang, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Genuk.

Tabel 1. 11
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Genuk

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Pasokan	Volume (Ton)	
1	Delamas	Jl. Wolter Monginsidi	Beras	Demak, Boyolali	40	
			Telur	Boja	40	
			Gula Jawa	Semarang	4	
			Gula Pasir	Semarang	12	
2	Indo Grosir	Jl. Kaligawe	Beras	Demak, Purwodadi, Boyolali	35	
			Telur	Boja	1,5	
			Gula Jawa	Semarang	3	
			Gula Pasir	Semarang	10	
			Terigu	Semarang	20	
			Beras	Demak, Purwodadi, Boyolali	15	
			Telur	Boja	3	
			Gula Jawa	Semarang	1	
			Gula Pasir	Semarang	3	
			Terigu	Semarang	3,5	
			Beras	Demak	5	
			Telur	Boja	3	
4	Pak Sam	Jl. Raya Genuk Kudu	Gula Pasir	Semarang	2,5	
			Terigu	Semarang	3	
			Grosir Teguh Jaya	Jl. Genuk (LIK)	Telur	

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

9. Wiayah Kecamatan Tembalang

Jaringan distribusi pangan di wilayah Kecamatan Tembalang, tercatat memiliki 18 unit agen distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Dinar Mas Raya, Dinar Asri, Jl. Emerald, Dinar Elok, Jl. Timoho Bulusan dan Gondang Raya. Produk yang disediakan diperkirakan meliputi gula pasir sebanyak 7,12 ton, gula jawa sebanyak 2,5 ton, beras sebanyak 37,1 ton, beras ketan sebanyak 2 ton, terigu sebanyak 0,5 ton, telur sebanyak 4,14 ton dan minyak goreng sebanyak 1,05 ton.

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Tembalang berasal dari Purwodadi, Gubuk, Mranggen, Subang, Semarang, Boyolali, Delanggu, Dargo, Dela Mas dan Magelang. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di wilayah Kota Semarang, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Tembalang.

Tabel 1. 12
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Tembalang

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Paokan	Volume (Ton)
1	Toko Saadah	Pasar Meteseh	Beras	Purwodadi	0,5
2	Toko Rom Beras	Pasar Meteseh	Beras	Gubuk	3
3	Warung Rakyat Barokah	Pasar Meteseh	Beras	Mranggen	1,5
4	Agen Eriyaato	Jl. Sawi No 5	Beras Ketan	Subang	2
			Gula Jawa	Semarang	2,5
			Telur		0,2
5	Delamas	Jl. Fatmawati	Beras	Boyolali	5
			Gula Pasir		2
			Telur		2
6	Toko Aneka	Jl. Klipang Raya	Beras	Delanggu	2
			Gula Pasir		1
7	Terang	Jl Fatmawati Raya	Beras		2
			Gula Pasir		1,5
8	Toko Kun Fayakun	Jl. Fatmawati Raya	Beras	Dargo	2
			Gula Pasir		0,5
			Minyak Goreng		0,05
9	Susilo	Pasar Sendang	Beras	Dela Mas	0,05
10	Toko Saudara	Klipang Raya	Beras	Mranggen	0,5
			Telur	Dela Mas	0,1
11	Toko T	Klipang Raya Ruko	Beras	Mranggen	1
			Gula Pasir	Dela Mas	1
			Telur		0,01
11	Aneka 2	Klipang Raya	Beras	Dargo	2
			Gula Pasir	Magelang	0,05
			Terigu		0,5
12	Toko Adem Ayem	Fatmawati	Beras		0,05
			Gula Pasir		0,07
13	Agen Wijaya Makmur	Dinar Mas Raya	Beras	Dela Mas	1
			Gula Pasir		1
			Minyak Goreng		0,05

No	Nama	Alamat	Produk	Asal Paokan	Volume (Ton)
14	Mr Jhon	Dinar Asri	Beras	Gubuk	0,5
15	Berkah	Jl. Emeral	Beras	Delanggu	4
			Telur		0,03
16	Sougiyanto	Dinar Elok	Beras	Salatiga, Purwodadi	4
17	Anugrah	Jl Timoho Bulusan	Beras	Meteseh	3
18	Toko Vina	Gondang Raya	Beras	Boyolali	5
			Minyak Goreng		0,5
			Telur		1,8

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

10. Wilayah Kecamatan Gajahmungkur

Jaringan distribusi pangan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur, tercatat memiliki 9 unit agen distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Jl. Papandayan, Jl. Tumpang Raya, Jl. Kelud Selatan, Jl. Kelud Selatan, Jl. Menoreh, Jl. Menoreh Timur dan Jl. Karang Rejo. Produk yang disediakan diperkirakan meliputi Gula pasir sebanyak 15 ton, Beras sebanyak 45,5 ton, Terigu sebanyak 12,6 ton, Telur sebanyak 7,5 ton, Minyak Goreng sebanyak 5,36 ton dan Daging ayam sebanyak 3 ton

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur berasal dari Dargo, Semarang, Gunung Pati, Ungaran, Demak, Delanggu, Boja dan dua perusahaan suplier yaitu Surya Kencana dan Sumber Makmur. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di wilayah Kota Semarang, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.

Tabel 1. 13
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Gajahmungkur

No	Nama Grosir	Alamat	Produk	Volume Pasokan (Ton)	Asal Pasokan
1	Toko Papandayan	Jl. Papandayan 20	Beras	25	Dargo
			Gula Pasir	4	Dargo
			Terigu	4	Dargo
			Minyak Goreng	0,96	Dargo
			Telur	2	Dargo
2	Toko Tumpang	Jl. Tumpang Raya	Beras	1	Semarang

No	Nama Grosir	Alamat	Produk	Volume Pasokan (Ton)	Asal Pasokan
			Gula Pasir	2	Semarang
			Terigu	2	Semarang
			Minyak Goreng	0,5	Semarang
			Telur	0,5	Semarang
3	Pemotongan Ayam Restu/Yono	Jl. Kelud Selatan	Daging Ayam	1,2	Gunung Pati, Ungaran
4	Pemotongan Ayam Putra Frame/Yatno	Jl. Kelud Selatan	Daging Ayam	1,8	Gunung Pati, Ungaran
5	Toko Baru/Hartoyo		Beras	4	
			Gula Pasir	4	
			Terigu	3	
			Minyak Goreng	0,5	
			Telur	1,6	
6	Toko Lumbung Beras/Agung	Jl. Menoreh	Beras	6	Demak
7	Toko 48 / Krisna	Jl. Menoreh	Beras	8	Surya Kencana
			Gula Pasir	2	Surya Kencana
			Terigu	1,4	Surya Kencana
			Minyak Goreng	2	Surya Kencana
			Telur	1	Surya Kencana
8	Toko Zam/Bu Zam	Jl. Menoreh Timur	Beras	0,5	Gunungpati
			Gula Pasir	2	Semarang
			Terigu	1	Semarang
			Minyak Goreng	0,5	Semarang
			Telur	0,4	Semarang
9	Toko Siswanti/Budi Sulis	Jl. Karang Rejo	Beras	1	Demak, Delanggu
			Gula Pasir	1	Sumber Makmur
			Terigu	1,2	Sumber Makmur
			Minyak Goreng	0,9	Sumber Makmur
			Telur	2	Boja

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

11. Wilayah Kecamatan Gunungpati

Jaringan distribusi pangan di wilayah Kecamatan Gunungpati, tercatat memiliki 35 unit grosir distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Jl. Manyaran Gunungpati, Jl. Raya Gunungpati, Sumur Jurang, Karangggene, Sadeng, Pakintelan, Kp. Siwarak, Ngablak dan Jatirejo. Produk yang disediakan diperkirakan meliputi Beras sebanyak 35 ton, Telur sebanyak 0,3 ton, Daging ayam sebanyak 38 ton, Sembako sebanyak 13 ton dan Peternakan sebanyak 153 ton.

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur berasal dari Gunungpati dan Sekitarnya, Banyubiru, Klaten, Delanggu, Sadeng dan dari perusahaan suplier yaitu PT BOJ. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di sekitar wilayah Kecamatan Gunungpati dan sekitarnya, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Gunungpati.

Tabel 1. 14
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Gunungpati

No	Nama Grosir	Produk	Volume Pasokan (Ton)	Asal Pasokan	Alamat
1	Mahkota Bima	Beras	2	Gunungpati Dan Sekitarnya	Jl. Manyaran Gunungpati
2	Rizky Putra	Beras	2	Gunungpati Dan Sekitarnya	Jl. Raya Gunungpati
3	Citra Utama	Beras	4	Banyubiru, Klaten	Sumur Jurang Rt 3/3
4	Grosir 88	Beras	7	Delanggu	Karangggene ng Rt 6/1
5	Afandi	Daging Ayam	24	Sadeng Kota Semarang	Sadeng
6	Rohmad	Daging Ayam	14	Sadeng Kota Semarang	Sadeng
7	Aripin	Telur	0,3	Sadeng Kota Semarang	Sadeng
8	Toko Renata	Beras	20	Klaten	Sadeng
9	Toko Laris	Sembako	5	Gunungpati Dan Sekitarnya	Pakintelan
10	Toko Amanah	Sembako	8	Gunungpati Dan Sekitarnya	Pakintelan
11	Suyatni	Peternakan	10,2	PT BOJ	Kp. Siwarak
12	Hanung	Peternakan	10,2	PT BOJ	Ngablak
13	Kayun	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo

No	Nama Grosir	Produk	Volume Pasokan (Ton)	Asal Pasokan	Alamat
14	Puji	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
15	Rutaman	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
16	Akhmad	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
17	Suprapti	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
18	Tarto	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
19	Sariman	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
20	Subur	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
21	Sahri	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
22	Wawan Bh	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
23	Agiska Rizki N	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
24	Abadi	Peternakan	10,2	PT BOJ	Ngablak
25	Sumadi	Peternakan	10,2	PT BOJ	Jatirejo
26	Agung N, Plalangan, Gunugpati	Gunungpati			
27	Barbanas, Mangunsari, Gunungpati	Gunungpati			
28	Lanu Handoko, Perengsari, Gunungpati	Gunungpati			
29	Barry Budiyanto, Kandri, Gunungpati	Gunungpati			
30	Kalyono W, Kandri, Gunungpati	Gunungpati			
31	Yudi K, Sumurjurang, Gunungpati	Gunungpati			
32	Dody Setya Graha, Sumurjuang, Gunungpati	Gunungpati			
33	Agung N, Plalangan, Gunugpati	Gunungpati			
34	Sukses Jaya	Jl. Raya Gunung Pati			
35	Laris	Jl. Pakintelan			

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

12. Wilayah Kecamatan Ngaliyan

Jaringan distribusi pangan di wilayah Kecamatan Ngaliyan, tercatat memiliki 2 unit grosir distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Jl. Candi Sukuh Timur Baban Kerep dan di Pasadena dengan nama UD Sukses Jaya. Barang yang disediakan yaitu sembako dengan pemasaran untuk wilayah Ngaliyan dan

sektarnya. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Tabel 1. 15
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Ngaliyan

No	Nama	Alamat	Produk
1	UD Sukses Jaya	Jl. Candi Sுகuh Timur - Baban Kerep	Sembako
2	UD Sukses Jaya	Pasadena	Sembako

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

13. Wilayah Kecamatan Mijen

Jaringan distribusi pangan di wilayah Kecamatan Mijen, tercatat memiliki 6 unit grosir distribusi pangan. Jumlah tersebut terletak di Bubakan dan Karangmalang. Produk yang disediakan diperkirakan meliputi Beras sebanyak 34 ton, Gula Pasir sebanyak 2,25 ton, Minyak Goreng sebanyak 6,1 ton, Singkong sebanyak 21 ton, Telur Ayam sebanyak 85,1 ton dan Terigu sebanyak 4,2 ton.

Bahan pokok utama pada agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Mijen berasal dari Boja, Ngabean, Mijen, Boyolali, Demak, Pemalang, Semarang, Gunungpati dan Kendal, serta dari perusahaan suplier yaitu PT. Surya Kencana. Semua barang kebutuhan pokok tersebut dipasarkan di sekitar wilayah Pabrik Casanatama Natur Indo Semarang, Jatisari, Bubakan dan Mijen, tidak didistribusikan kembali ke luar Kota Semarang. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Mijen.

Tabel 1. 16
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di Kecamatan Mijen

No	Nama Distributor	Produk	Volume Pasokan (Ton)	Asal Pasokan	Penjualan (Ton)	Alamat
1	Anggoro W	Singkong	20	Mijen, Gunungpati , Kendal	20	Bubakan
	Subikamto	Singkong	1	Mijen, Gunungpati , Kendal	1	Bubakan
		Beras	2	Mijen, Gunungpati , Kendal	2	
2	Eko Ariwibowo	Telur Ayam	2,1	Semarang	2,1	Bubakan
		Gula Pasir	0,25	Semarang	0,25	

No	Nama Distributor	Produk	Volume Pasokan (Ton)	Asal Pasokan	Penjualan (Ton)	Alamat
		Minyak Goreng	0,1	Semarang	0,1	
		Terigu	0,2	Semarang	0,2	
3	Toko Anindya	Beras	32	Boyolali, Demak, Pemalang	32	Kel. Karan Malang
		Terigu	4	PT Surya Kencana Semarang	4	
		Gula Pasir	2	PT Surya Kencana Semarang	2	
		Minyak Goreng	6	PT Surya Kencana Semarang	6	
		Telur Ayam	20	Mijen, Boja	20	
4	Arifai	Telur Ayam	18	Ngabean, Boja	18	Kel. Karan Malang
5	Tugiman	Telur Ayam	15	Ngabean, Boja	15	Kel. Karan Malang
6	Abdul Khamid	Telur Ayam	30	Siroto, Boja	30	Kel. Karan Malang

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

14. Wilayah Kecamatan Tugu

Jaringan distribusi pangan di wilayah Kecamatan Tugu tercatat hanya memiliki 1 unit grosir distribusi pangan. Nama grosir pangan tersebut yaitu Rafi'an (Toko Roda Mas) dengan produk yang disediakan adalah beras. Agen grosir pangan ini terletak di Jl. Raya Mangkang Km 15. Barang yang disediakan dengan pemasaran untuk wilayah Tugu dan sekitarnya. Berikut di bawah ini daftar agen jaringan pangan di wilayah Kecamatan Tugu.

Tabel 1. 17
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama di Kecamatan Tugu

No	Nama	Produk	Alamat
1	Rafi'an (Toko Roda Mas)	Beras	Jl. Raya Mangkang Km 15

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

15. UPTD JOHAR

UPTD Johar memiliki 9 pasar. Pasar johar utara memiliki jenis jualan bumbu, daging, tahu tempe, buah buahan dan makanan. Pasar Johar Tengah dan yaik memiliki jenis jualan yang lengkap, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1. 18
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di UPTD Johar

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
UPTD :	1	JOHAR						
Pasar :	01.01	JOHAR UTARA						
		Sembako	0	0	0	0	0	0
		Bumbon	17	0	1	9	0	7
		Daging	5	0	0	5	0	0
		Tahu/Tempe	3	0	0	1	0	2
		Buah-Buahan	72	0	0	43	0	29
		Roti/Makanan	19	0	0	19	0	0
			116	0	1	77	0	38
Pasar :	01.02	JOHAR TENGAH						
		Sembako	10	0	9	1	0	0
		Bumbon	337	60	166	97	0	14
		Daging	133	3	88	39	0	3
		Tahu/Tempe	52	1	36	13	0	2
		Buah-Buahan	86	7	22	51	0	6
		Roti/Makanan	81	3	45	30	0	3
			699	74	366	231	0	28
Pasar :	01.03	JOHAR SELATAN						
		Sembako	2	0	2	0	0	0
		Bumbon	584	139	345	100	0	0
		Daging	2	0	1	1	0	0
		Tahu/Tempe	13	0	11	2	0	0
		Buah-Buahan	5	1	1	3	0	0
		Roti/Makanan	7	2	2	3	0	0
			613	142	362	109	0	0
Pasar :	01.05	YAIK PERMAI						
		Sembako	1	0	1	0	0	0
		Bumbon	77	4	0	35	0	38
		Daging	29	0	0	24	0	5
		Tahu/Tempe	11	0	1	8	0	2
		Buah-Buahan	454	0	274	173	0	7
		Roti/Makanan	22	0	1	19	0	2
			594	4	277	259	0	54
Pasar :	01.06	YAIK BARU						
		Sembako	0	0	0	0	0	0
		Bumbon	7	0	2	5	0	0
		Daging	0	0	0	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	15	6	0	9	0	0
		Roti/Makanan	18	0	5	13	0	0
			40	6	7	27	0	0
Pasar :	01.07	PUNGKURAN						
		Sembako	0	0	0	0	0	0
		Bumbon	195	6	177	6	0	6
		Daging	2	0	1	1	0	0
		Tahu/Tempe	1	0	0	1	0	0
		Buah-Buahan	27	0	25	2	0	0
		Roti/Makanan	29	0	11	18	0	0
			254	6	214	28	0	6
Pasar :	01.08	KANJENGAN						

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
		Sembako	0	0	0	0	0	0
		Bumbon	256	16	0	0	0	240
		Daging	83	0	0	0	0	83
		Tahu/Tempe	134	0	0	0	0	134
		Buah-Buahan	129	27	0	0	0	102
		Roti/Makanan	48	0	0	0	0	48
			650	43	0	0	0	607
Pasar :	01.09	NON DT						
		Sembako	0	0	0	0	0	0
		Bumbon	28	0	0	0	28	0
		Daging	0	0	0	0	0	0
		Tahu/Tempe	9	0	0	0	9	0
		Buah-Buahan	82	0	0	0	82	0
		Roti/Makanan	44	0	0	0	44	0
			163	0	0	0	163	0
		Total	3.129	275	1.227	731	163	733

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

16. UPTD KARIMATA

Tempat distribusi barang bahan kebutuhan pangan yang dikelola oleh UPTD Karimata sebanyak 6 pasar. Pasar Bubakan hanya menjual makanan saja, Pasar Karimata, dargo, Rejomulyo, Waru Indah memiliki jenis jualan yang lengkap. Berikut ini jenis jualan di pasar UPTD Karimata.

Tabel 1. 19

Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama di UPTD Karimata

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
UPTD :	2	KARIMATA						
Pasar :	02.01	BUBAKAN						
		Sembako	0	0	0	0	0	0
		Bumbon	0	0	0	0	0	0
		Daging	0	0	0	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	0	0	0	0	0	0
		Roti/Makanan	3	3	0	0	0	0
			3	3	0	0	0	0
Pasar :	02.02	KARIMATA						
		Sembako	25	0	25	0	0	0
		Bumbon	25	0	25	0	0	0
		Daging	18	0	18	0	0	0
		Tahu/Tempe	5	0	5	0	0	0
		Buah-Buahan	3	0	3	0	0	0
		Roti/Makanan	10	0	10	0	0	0
			86	0	86	0	0	0
Pasar :	02.03	LANGGAR						

UPTD / Pasar	Jenis Jualan	Total					
		Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	Pancakan
	Sembako	14	4	10	0	0	0
	Bumbon	126	0	125	0	0	1
	Daging	51	0	49	0	0	2
	Tahu/Tempe	15	0	11	0	0	4
	Buah-Buahan	20	0	18	0	0	2
	Roti/Makanan	27	1	15	0	0	11
		253	5	228	0	0	20
Pasar :	02.04	REJOMULYO					
	Sembako	48	4	41	2	0	1
	Bumbon	203	9	155	26	0	13
	Daging	298	32	231	6	0	29
	Tahu/Tempe	26	0	14	6	0	6
	Buah-Buahan	14	0	9	0	0	5
	Roti/Makanan	24	0	8	8	0	8
		613	45	458	48	0	62
Pasar :	02.05	DARGO					
	Sembako	84	0	84	0	0	0
	Bumbon	128	0	128	0	0	0
	Daging	85	0	85	0	0	0
	Tahu/Tempe	28	0	28	0	0	0
	Buah-Buahan	34	0	34	0	0	0
	Roti/Makanan	10	0	10	0	0	0
		369	0	369	0	0	0
Pasar :	02.06	WARU INDAH					
	Sembako	89	18	71	0	0	0
	Bumbon	104	1	103	0	0	0
	Daging	57	0	57	0	0	0
	Tahu/Tempe	31	0	31	0	0	0
	Buah-Buahan	37	0	37	0	0	0
	Roti/Makanan	35	6	29	0	0	0
		353	25	328	0	0	0
		1,677	78	1,469	48	0	82

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

17. UPTD BULU

Tempat distribusi barang bahan kebutuhan pangan yang dikelola oleh UPTD Bulu sebanyak 7 pasar. Semua pasar di daerah Bulu memiliki jenis jualan yang lengkap. Berikut ini jenis jualan di pasar UPTD Bulu.

Tabel 1. 20
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama di UPTD Bulu

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	Pancakan
UPTD :	3	BULU						
Pasar :	03.01	SURTIKANTI						
		Sembako	15	5	10	0	0	0
		Bumbon	55	1	54	0	0	0
		Daging	39	0	39	0	0	0
		Tahu/Tempe	14	0	14	0	0	0
		Buah-Buahan	20	0	20	0	0	0
		Roti/Makanan	21	1	20	0	0	0
			164	7	157	0	0	0
Pasar :	03.02	TANAH MAS						
		Sembako	2	0	2	0	0	0
		Bumbon	13	5	8	0	0	0
		Daging	7	0	7	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	0	0	0	0	0	0
		Roti/Makanan	3	3	0	0	0	0
			25	8	17	0	0	0
Pasar :	03.03	PURWOGOND O						
		Sembako	7	0	7	0	0	0
		Bumbon	75	0	41	7	0	27
		Daging	55	0	38	2	0	15
		Tahu/Tempe	16	0	9	2	0	5
		Buah-Buahan	25	0	2	4	0	19
		Roti/Makanan	28	0	14	3	0	11
			206	0	111	18	0	77
Pasar :	03.04	BOOM LAMA						
		Sembako	23	9	14	0	0	0
		Bumbon	55	1	50	4	0	0
		Daging	16	0	16	0	0	0
		Tahu/Tempe	11	0	11	0	0	0
		Buah-Buahan	13	0	12	1	0	0
		Roti/Makanan	17	0	15	2	0	0
			135	10	118	7	0	0
Pasar :	03.05	B U L U	0					
		Sembako	81	26	52	3	0	0
		Bumbon	363	22	191	20	0	130
		Daging	169	0	85	25	0	59
		Tahu/Tempe	81	1	10	11	0	59
		Buah-Buahan	64	0	46	2	0	16
		Roti/Makanan	128	23	50	8	18	29
			886	72	434	69	18	293
Pasar :	03.06	RANDUSARI						
		Sembako	3	0	3	0	0	0
		Bumbon	40	0	40	0	0	0
		Daging	15	0	15	0	0	0
		Tahu/Tempe	5	0	5	0	0	0

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
		Buah-Buahan	3	0	3	0	0	0
		Roti/Makanan	12	0	11	0	0	1
			78	0	77	0	0	1
Pasar :	03.07	SAMPANGAN						
		Sembako	77	66	11	0	0	0
		Bumbon	54	0	54	0	0	0
		Daging	41	0	41	0	0	0
		Tahu/Tempe	18	0	18	0	0	0
		Buah-Buahan	12	0	12	0	0	0
		Roti/Makanan	40	9	31	0	0	0
			242	75	167	0	0	0
			656.081	172	1,081	94	18	371

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

18. UPTD JATINGALEH

Tempat distribusi barang bahan kebutuhan pangan yang dikelola oleh UPTD Jatingaleh sebanyak 10 pasar. Semua pasar di daerah Jatingaleh memiliki jenis jualan yang lengkap. Berikut ini jenis jualan di pasar UPTD Jatingaleh.

Tabel 1. 21
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di UPTD Jatingaleh

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
UPTD :	5	JATINGALEH						
Pasar :	05.01	PETERONGAN						
		Sembako	28	1	26	1	0	0
		Bumbon	407	0	147	40	18	202
		Daging	169	0	35	26	3	105
		Tahu/Tempe	94	0	7	9	7	71
		Buah-Buahan	64	0	8	4	20	32
		Roti/Makanan	91	0	27	24	6	34
			853	1	250	104	54	444
Pasar :	05.02	WONODRI						
		Sembako	19	0	17	2	0	0
		Bumbon	183	0	42	1	0	140
		Daging	290	0	133	68	0	89
		Tahu/Tempe	99	0	19	16	0	64
		Buah-Buahan	13	0	0	0	0	13
		Roti/Makanan	58	0	21	3	0	34
			662	0	232	90	0	340
Pasar :	05.03	SISINGAMANG ARAJA						
		Sembako	14	5	9	0	0	0

UPTD / Pasar	Jenis Jualan	Total					
		Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	Pancakan
	Bumbon	30	1	25	4	0	0
	Daging	5	0	4	1	0	0
	Tahu/Tempe	5	0	4	1	0	0
	Buah-Buahan	1	0	0	1	0	0
	Roti/Makanan	9	0	6	3	0	0
		64	6	48	10	0	0
Pasar :	05.04	K A G O K					
	Sembako	0	0	0	0	0	0
	Bumbon	20	0	16	0	0	4
	Daging	6	0	5	1	0	0
	Tahu/Tempe	1	0	1	0	0	0
	Buah-Buahan	0	0	0	0	0	0
	Roti/Makanan	3	1	1	0	0	1
		30	1	23	1	0	5
Pasar :	05.05	J A N G G L I					
	Sembako	1	0	1	0	0	0
	Bumbon	46	0	37	9	0	0
	Daging	8	0	4	4	0	0
	Tahu/Tempe	7	0	3	3	0	1
	Buah-Buahan	4	0	1	3	0	0
	Roti/Makanan	11	0	6	4	0	1
		77	0	52	23	0	2
Pasar :	05.06	JATINGALEH					
	Sembako	13	3	10	0	0	0
	Bumbon	78	0	75	0	2	1
	Daging	37	0	36	0	0	1
	Tahu/Tempe	15	0	12	1	0	2
	Buah-Buahan	36	0	35	0	0	1
	Roti/Makanan	32	4	20	0	3	5
		211	7	188	1	5	10
Pasar :	05.07	RASAMALA					
	Sembako	74	10	64	0	0	0
	Bumbon	184	0	118	51	0	15
	Daging	105	0	60	41	0	4
	Tahu/Tempe	25	0	13	12	0	0
	Buah-Buahan	60	0	44	15	0	1
	Roti/Makanan	57	1	23	17	16	0
		505	11	322	136	16	20
Pasar :	05.08	D A M A R					
	Sembako	46	24	22	0	0	0
	Bumbon	82	2	80	0	0	0
	Daging	33	0	33	0	0	0
	Tahu/Tempe	15	0	15	0	0	0
	Buah-Buahan	27	3	24	0	0	0
	Roti/Makanan	15	0	14	1	0	0
		218	29	188	1	0	0
Pasar :	05.09	SRONDOL					
	Sembako	1	1	0	0	0	0

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
		Bumbon	7	0	7	0	0	0
		Daging	3	0	3	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	0	0	0	0	0	0
		Roti/Makanan	0	0	0	0	0	0
			11	1	10	0	0	0
Pasar :	05.10	BANYUMANIK						
		Sembako	0	0	0	0	0	0
		Bumbon	10	0	10	0	0	0
		Daging	1	0	1	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	1	1	0	0	0	0
		Roti/Makanan	1	0	1	0	0	0
			13	1	12	0	0	0
			2.644	57	1.325	366	75	821

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

19. UPTD KARANGAYU

Tempat distribusi barang bahan kebutuhan pangan yang dikelola oleh UPTD Karangayu sebanyak 9 pasar. Pasar Manyaran dan Purwoyoso tidak menyediakan daging dan tempe tahu, namun yang lainnya memiliki jenis jualan yang lengkap. Berikut ini jenis jualan di pasar UPTD Karangayu.

Tabel 1. 22
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di UPTD Karangayu

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
UPTD :	4	KARANGAYU						
Pasar :	04.01	KARANGAYU						
		Sembako	45	12	14	19	0	0
		Bumbon	389	18	125	53	0	193
		Daging	393	0	207	155	0	31
		Tahu/Tempe	181	0	43	14	0	124
		Buah-Buahan	84	0	4	24	0	56
		Roti/Makanan	122	10	17	27	0	68
			1.215	40	410	292	0	472
Pasar :	04.02	SIMONGAN						
		Sembako	7	3	4	0	0	0
		Bumbon	53	1	12	14	0	26
		Daging	20	0	12	4	0	4
		Tahu/Tempe	8	0	4	0	0	4
		Buah-Buahan	10	0	1	0	0	9

UPTD / Pasar	Jenis Jualan	Total					
		Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	Pancakan
	Roti/Makanan	21	1	3	1	0	16
		119	5	36	19	0	59
Pasar :	04.03	MANYARAN					
		Sembako	5	1	4	0	0
		Bumbon	5	0	5	0	0
		Daging	0	0	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	0	0	0	0	0
		Roti/Makanan	2	0	2	0	0
			12	1	11	0	0
Pasar :	04.04	NGALIYAN					
		Sembako	5	0	1	4	0
		Bumbon	36	1	5	22	3
		Daging	30	0	17	11	0
		Tahu/Tempe	7	0	2	5	0
		Buah-Buahan	16	0	0	9	5
		Roti/Makanan	48	1	5	20	17
			142	2	30	71	25
Pasar :	04.05	JERAKAH					
		Sembako	9	5	4	0	0
		Bumbon	138	1	72	41	0
		Daging	71	0	36	28	0
		Tahu/Tempe	23	0	14	6	0
		Buah-Buahan	29	0	18	8	0
		Roti/Makanan	88	3	39	25	0
			3.229	9	183	108	0
Pasar :	04.06	MANGKANG					
		Sembako	12	4	8	0	0
		Bumbon	173	4	155	0	0
		Daging	69	0	66	0	0
		Tahu/Tempe	27	0	25	0	0
		Buah-Buahan	28	0	28	0	0
		Roti/Makanan	50	0	45	0	2
			359	8	327	0	2
Pasar :	04.07	M I J E N					
		Sembako	29	7	22	0	0
		Bumbon	36	3	16	2	0
		Daging	18	1	15	1	0
		Tahu/Tempe	6	0	6	0	0
		Buah-Buahan	4	0	1	0	0
		Roti/Makanan	24	1	11	0	0
			117	12	71	3	0
Pasar :	04.08	GUNUNGPATI					
		Sembako	1	0	1	0	0
		Bumbon	56	3	45	8	0
		Daging	26	0	26	0	0
		Tahu/Tempe	14	0	14	0	0
		Buah-Buahan	9	0	9	0	0

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	Pancakan
		Roti/Makanan	18	6	11	1	0	0
			124	9	106	9	0	0
Pasar :	04.09	PURWOYOSO						
		Sembako	14	14	0	0	0	0
		Bumbon	0	0	0	0	0	0
		Daging	0	0	0	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	1	1	0	0	0	0
		Roti/Makanan	7	7	0	0	0	0
			22	22	0	0	0	0
			5.339	108	1.174	502	27	656

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

20. UPTD PEDURUNGAN

Tempat distribusi barang bahan kebutuhan pangan yang dikelola oleh UPTD Pedurungan sebanyak 11 pasar. Pasar Satria wibawa dan Udan Riris tidak tersedia tahu tempe, Tlogosari tidak tersedia tahu tempe dan daging, sedangkan yang lain memiliki jenis jualan yang lengkap. Berikut ini jenis jualan di pasar UPTD Pedurungan.

Tabel 1. 23
Ketersediaan dan Distrbusi Bahan Pangan Utama
di UPTD Pedurungan

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	Pancakan
UPTD :	6	PEDURUNGAN						
Pasar :	06.01	G E N U K						
		Sembako	49	12	33	4	0	0
		Bumbon	130	4	75	6	0	45
		Daging	92	0	60	0	0	32
		Tahu/Tempe	26	0	4	0	0	22
		Buah-Buahan	40	4	8	5	0	23
		Roti/Makanan	51	4	16	8	0	23
			388	24	196	23	0	145
Pasar :	06.02	BANGETAYU						
		Sembako	57	19	35	3	0	0
		Bumbon	185	4	65	33	0	83
		Daging	154	0	95	3	0	56
		Tahu/Tempe	75	1	11	5	0	58
		Buah-Buahan	45	1	14	2	0	28
		Roti/Makanan	76	9	27	9	0	31
			592	34	247	55	0	256
Pasar :	06.03	SURYO KUSUMO						
		Sembako	18	7	11	0	0	0

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
		Bumbon	64	0	32	19	0	13
		Daging	69	1	36	28	0	4
		Tahu/Tempe	9	0	7	0	0	2
		Buah-Buahan	15	0	6	7	0	2
		Roti/Makanan	24	4	15	4	0	1
			199	12	107	58	0	22
Pasar :	06.04	SATRIO WIBOWO						
		Sembako	23	6	17	0	0	0
		Bumbon	37	1	36	0	0	0
		Daging	28	0	28	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	12	0	12	0	0	0
		Roti/Makanan	21	0	21	0	0	0
			121	7	114	0	0	0
Pasar :	06.05	UDAN RIRIS						
		Sembako	7	0	7	0	0	0
		Bumbon	14	0	14	0	0	0
		Daging	4	0	4	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	0	0	0	0	0	0
		Roti/Makanan	11	1	10	0	0	0
			36	1	35	0	0	0
Pasar :	06.06	TLOGOSARI						
		Sembako	3	3	0	0	0	0
		Bumbon	20	16	4	0	0	0
		Daging	0	0	0	0	0	0
		Tahu/Tempe	0	0	0	0	0	0
		Buah-Buahan	1	0	1	0	0	0
		Roti/Makanan	0	0	0	0	0	0
			24	19	5	0	0	0
Pasar :	06.07	PEDURUNGAN						
		Sembako	45	21	24	0	0	0
		Bumbon	77	0	77	0	0	0
		Daging	72	0	72	0	0	0
		Tahu/Tempe	21	0	21	0	0	0
		Buah-Buahan	22	1	21	0	0	0
		Roti/Makanan	17	1	16	0	0	0
			254	23	231	0	0	0
Pasar :	06.08	GAYAMSARI						
		Sembako	91	34	54	3	0	0
		Bumbon	203	6	144	53	0	0
		Daging	80	0	75	5	0	0
		Tahu/Tempe	35	0	16	19	0	0
		Buah-Buahan	32	0	25	7	0	0
		Roti/Makanan	34	5	14	15	0	0
			475	45	328	102	0	0

UPTD / Pasar		Jenis Jualan	Total					Pancakan
			Jumlah	Kios	Los	DT	Non DT	
Pasar :	06.09	KEDUNGMUNDU						
		Sembako	19	4	15	0	0	0
		Bumbon	49	1	32	0	0	16
		Daging	26	0	17	0	0	9
		Tahu/Tempe	11	0	5	0	0	6
		Buah-Buahan	12	0	1	0	0	11
		Roti/Makanan	34	1	17	1	0	15
			151	6	87	1	0	57
Pasar :	06.10	M R I C A N						
		Sembako	9	0	9	0	0	0
		Bumbon	57	0	56	0	0	1
		Daging	27	0	23	4	0	0
		Tahu/Tempe	18	0	16	0	0	2
		Buah-Buahan	11	0	3	0	0	8
		Roti/Makanan	28	0	22	4	0	2
			150	0	129	8	0	13
Pasar :	06.11	BANJARDOWO						
		Sembako	96	44	52	0	0	0
		Bumbon	30	1	29	0	0	0
		Daging	40	0	40	0	0	0
		Tahu/Tempe	16	0	16	0	0	0
		Buah-Buahan	1	0	1	0	0	0
		Roti/Makanan	34	25	9	0	0	0
			217	70	147	0	0	0

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

1.4.4 Situasi Pendukung Pembangunan Pangan dan Gizi

1. Pilar 1 : Perbaikan Gizi Masyarakat

Pilar I perbaikan gizi masyarakat menurut Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi meliputi: promosi dan pendidikan gizi masyarakat; pemberian suplementasi gizi; pelayanan kesehatan dan masalah gizi; pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi; jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan pendidikan anak usia dini. Pilar I memiliki indikator sebagai berikut :

Tabel 1. 24
Capaian Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat Kota Semarang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT %	44,29	96,09	96,12	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan	97,23	97,05	97,64	98,59	100,00	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
	Tablet Tambah Darah (TTD) (%)						
3.	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)	1,05	0,36	1,93	2,24	2,97	Dinas Kesehatan
4.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)	2,73	3,54	3,18	2,19	2,43	Dinas Kesehatan
5.	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita (%)	4,06	4,10	3,66	2,64	2,73	Dinas Kesehatan
6.	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak dibawah dua tahun(%)	-	-	-	0,95	2,37	Dinas Kesehatan
7.	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium (%)	98,13	98,70	98,70	99,20	99,24	Dinas Kesehatan
8.	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	96,33	92,85	98,68	96,40	105,77	Dinas Kesehatan
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
10.	Cakupan Kunjungan Bayi	98,90	98,03	98,14	98,34	100,09	Dinas Kesehatan
11.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	9,37	8,38	7,63	7,56	6,38	Dinas Kesehatan
12.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 balita)	1214/ 104,35 1	1219/ 106,86 7	1205/ 107,38 9	1587/ 107,84 6	1266/ 107,071	Dinas Kesehatan
13.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,38	0,40	0,38	0,28	0,38	Dinas Kesehatan
14.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	2,73	3,54	3,18	2,19	2,43	Dinas Kesehatan
15.	Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 Kelahiran Hidup	11,34	10,34	8,81	8,75	7,46	Dinas Kesehatan
16.	Persentasi bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)	-	-	66,44	79,15	91,70	Dinas Kesehatan
17.	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)	81,55	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
18.	Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) (%)	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan
19.	Peresentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
20.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 7 dan kelas 10 (%)	97,93	98,08	98,30	99,50	100,00	Dinas Kesehatan
21.	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
22.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) (%)	97,21	97,46	97,50	97,57	100,00	Dinas Kesehatan
23.	Persentase kunjungan neonatal 1 (KN1) (%)	99,82	99,91	97,97	98,16	100,00	Dinas Kesehatan
24.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	18,86	18,34	19,30	18,34	17,24	
25.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	97,87	97,53	97,58	99,98	100,00	Dinas Kesehatan
26.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan orientasi program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
27.	Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta jiwa)	373.87 8	276.49 2	228.65 2	452.71 0	607.839	Dinas Kesehatan
28.	Jumlah penduduk yang menjadi peserta non-penerima bantuan iuran (non-PBI) melalui JKN/Kartu Indonesia	503.23 8	1.000. 175	1.067. 251	1.179. 572	1.112.5 61	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
	Sehat (KIS) (dalam juta jiwa)						
29.	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang dapat mengakses layanan kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial	-	24.112	24.748	26.858	25.225	Dinas Sosial
30.	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang mendapatkan Family Developmen Session (FDS) terkait gizi dan kesehatan		23.426	23.662	24.560	24.250	Dinas Sosial
31.	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra)				24.560	24.265	Dinas Sosial
32.	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT)				24.560	24.265	Dinas Sosial
33.	Jumlah Lembaga PAUD pembina yang menyelenggarakan holistik integratif (%)	-	-	126	136	146	Dinas Pendidikan
34.	Lembaga menyelenggarakan pendidikan untuk intervensi penurunan prevalensi stunting (lembaga)	-	-	-	20	25	Dinas Pendidikan
35.	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan UKS:	338	339	343	353	355	Dinas Pendidikan
36.	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan Kantin Sehat	246	248	257	266	270	Dinas Pendidikan
37.	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan Sanitasi	341	342	345	346	348	Dinas Pendidikan
38.	Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapatkan program gizi anak sekolah	17.808	18.778	20.280	16.546	16.669	Dinas Pendidikan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
39.	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak (%)	90,5	92,1	95,0	96,5	98,3	Dinas Dalduk KB
40.	Persentase keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000 HPK (%)	90	92	95	97	98	Dinas Dalduk KB
41.	Sosialisasi Keluarga dan anak sebagai pelopor dan pelapor dalam memahami ASI, gizi seimbang, dan bahaya rokok	16	16	16	16	16	Dinas Kesehatan
42.	Peningkatan kualitas pelayanan KUA /Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah (juta)		150 catin	640 catin	800 catin	1.350 catin	Kemenag
43.	Peningkatan umat yang memperoleh bimbingan/Jumlah pembinaan keluarga sakinah yang terstandar (provinsi)	-	-	-	20	20	Kemenag
	RA	129	129	129	129	129	Kemenag
	MI	83	83	83	83	83	Kemenag
	MTs	37	37	37	37	38	Kemenag
	MA	27	27	27	27	28	Kemenag

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

2. Pilar 2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan Yang Beragam

Pilar 2 peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam menurut Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi meliputi: produksi pangan dalam negeri; penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal; distribusi pangan; konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Capaian kinerja pada pilar 2 aksesibilitas pangan beragam di Kota Semarang secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 25
Capaian Pilar 2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan Yang Beragam
Kota Semarang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Tercapainya produksi padi (ton)	38.504,0	39.328,0	35.845,7	37.340,3	32.975,1	Dinas Pertanian
2.	Tecapainya produksi jagung (ton)	3.800	2.632	3.892	4.373	3.568,36	Dinas Pertanian
3.	Tercapainya produksi kedelai (ton)			20,8	17,9	0	Dinas Pertanian
4.	Tercapainya produksi kacang tanah (ton)	989	469	466,5	277,8	124,31	Dinas Pertanian
5.	Tercapainya produksi kacang hijau (ton)	247	19	26,2	2,5	1,8	Dinas Pertanian
6.	Tercapainya produksi ubi kayu (ton)	6.075	5.073	3.267	2.822,6	2.848,29	Dinas Pertanian
7.	Tercapainya produksi ubi jalar (ton)	84	79	124	32	13	Dinas Pertanian
8.	Produksi jeruk (ton)	4,3	4,4	7,5	3	30,05	Dinas Pertanian
9.	Produksi mangga (ton)	3.029,1	2.302,9	3.322,6	2.935,9	1.810,70	Dinas Pertanian
10.	Produksi manggis (ton)	4	6	6	1,5	7,8	Dinas Pertanian
11.	Produksi salak (ton)	21,4	21,5	22,9	27,1	29,1	Dinas Pertanian
12.	Produksi nenas (ton)	27,8	20,4	10	12,2	28,6	Dinas Pertanian
13.	Produksi pisang (kw)	24.909,7	27.605,4	27.652,9	15.676,3	19.639,50	Dinas Pertanian
14.	Produksi cabai besar (ton)	3,8	11,7	16,3	0,7	3	Dinas Pertanian
15.	Produksi cabai rawit (ton)	10,7	23,5	14,3	9,9	4,7	Dinas Pertanian
16.	Produksi bawang merah (ton)	-	-	30	-	-	Dinas Pertanian
17.	Produksi tomat (ton)	0,1	0,1	-	-	-	Dinas Pertanian
18.	Produksi kangkung (ton)	17,6	22,9	20,6	18,8	16,7	Dinas Pertanian
19.	Produksi bayam(ton)	5,2	4,1	4	5,2	2,08	Dinas Pertanian
20.	Produksi kelapa (ton)	223,39	220,94	245,48	234,12	234,73	Dinas Pertanian

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
21.	Produksi tebu (ton)	879,8	820,75	803,6	524,3	521,63	Dinas Pertanian
22.	Produksi daging sapi/kerbau (ton)	2.293,9		2.518,1	2.533	2.455	Dinas Pertanian
23.	Produksi daging ayam buras (ton)				1.139	1.021	Dinas Pertanian
24.	Produksi daging ayam ras petelur (ton)	221	244	265	287	308	Dinas Pertanian
25.	Produksi daging ayam ras pedaging (ton)	16.530	17.196	17.908	18.603	19.327	Dinas Pertanian
26.	Produksi daging itik (ton)	344	377	416	457	499	Dinas Pertanian
27.	Produksi telur (ton)	6.969	7.170	6.224	8.440	8.045	Dinas Pertanian
28.	Jumlah hewan yang dipotong di RPH	10.695	9.750	9.615	8.751	17.443	Dinas Pertanian
29.	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan penularan zoonosis	Rp.342.872.000	Rp.422.000.000	Rp.560.200.000	Rp.375.500.000	Rp.638.845.000	Dinas Pertanian
30.	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan (kawasan)	16	17	17	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
31.	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kelompok)	19	30	42	49	65	Dinas Ketahanan Pangan
32.	Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) /Toko Tani Indonesia (TTI) (unit)	0	0	0	TTI : 7	LUPM : 1TTI : 7	Dinas Ketahanan Pangan
33.	Jumlah lokasi kampanye penganekaragaman pangan (lokasi)	16	16	16	16	16	Dinas Ketahanan Pangan
34.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Rp)	70.000.000	70.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
35.	Lomba cipta menu B2SA dan promosi Konsumsi Pangan Segar (kegiatan)	7	7	7	7	7	Dinas Ketahanan Pangan
36.	Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Rp)	0	30.000.000	33.892.000	55.000.000	141.440.000	Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
37.	Peningkatan Peran dewan Ketahanan Pangan (Rp)	35.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
38.	Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (ton)	40,0	51,0	51,0	51,0	54,8	Dinas Ketahanan Pangan
39.	Jumlah lumbung yang difasilitasi (lumbung) (kumulatif)	14	15	15	15	15	Dinas Ketahanan Pangan
40.	Jumlah kelompok wanita tani desa pelaksana P2KP (KWT)	19	30	42	49	65	Dinas Ketahanan Pangan
41.	Jumlah KWT pengolah pangan alternatif yang difasilitasi (KWT)	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan
42.	Persentase penanganan daerah rawan pangan (desa %)	68	78	98	114	122	Dinas Ketahanan Pangan
43.	Ketersediaan pangan utama (ton)	398.374	368.593	360.374	362.593	366.374	Dinas Ketahanan Pangan
44.	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang terfasilitasi (kawasan)(komulatif)	16	17	17	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
45.	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (desa) Prog.P2KP	19	30	42	49	65	Dinas Ketahanan Pangan
46.	Konsumsi Protein /Kap/hr (gram)	57,8	53,6	54,7	54,5	53,6	Dinas Ketahanan Pangan
47.	Skor PPH	90,6	90,9	87,1	87,2	87,7	Dinas Ketahanan Pangan
48.	Jumlah Koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan(DKP) dalam mendukung pangan gizi(Rakor)	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan
49.	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat/LDPM (Gapoktan)	0	0	0	0	1	Dinas Ketahanan Pangan
50.	Jumlah usaha pangan masyarakat	0	0	0	7	7	Dinas Ketahanan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
	(UPM)/Toko Tani Indonesia(TTI)/Toko)						Pangan
51.	Skor PPH berdasarkan kelompok Pangan						Dinas Ketahanan Pangan
a.	Padi-padian	25	25	24,7	25	25	Dinas Ketahanan Pangan
b.	Umbi-umbian	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0	Dinas Ketahanan Pangan
c.	Pangan hewani	19,3	19,6	18,2	17,7	17,2	Dinas Ketahanan Pangan
d.	Minyak dan Lemak	5,00	5,01	5,00	5,00	5,00	Dinas Ketahanan Pangan
e.	Buah/Biji berminyak	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan
f.	Kacang-kacangan	10	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan
g.	Gula	2,2	2,1	1,9	2	1,7	Dinas Ketahanan Pangan
h.	Sayur dan buah	26,1	26,1	24,3	24,6	27,8	Dinas Ketahanan Pangan
52.	Konsumsi kelompok pangan						Dinas Ketahanan Pangan
a.	Beras (kg/Kp/thn)	100,08	100,04	99,75	105,8	101,6	Dinas Ketahanan Pangan
b.	Pangan hewani(Kg/Kp/thn)	55,88	34,53	34,45	34,5	32,59	Dinas Ketahanan Pangan
c.	Sayur dan buah (kg/Kp/thn)	98,77	73,47	73,58	74,3	78,18	Dinas Ketahanan Pangan
53.	Konsumsi energy (Kkal/Kp/hari)	1.975,9	1.979,3	1.992,6	2.006,1	2.006,1	Dinas Ketahanan Pangan
a.	Padi-padian	1.061,6	1.061,7	1.061,3	1.073,3	1.089,8	Dinas Ketahanan Pangan
b.	Umbi-umbian	76,7	87,5	86,9	87,0	87,5	Dinas Ketahanan Pangan
c.	Pangan hewani	193,3	195,9	195,4	190,1	184,8	Dinas Ketahanan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
							Pangan
d.	Minyak dan Lemak	215,4	216,3	213,4	217,2	242,9	Dinas Ketahanan Pangan
e.	Buah/Biji berminyak	40,6	51,7	54,3	55,8	44,7	Dinas Ketahanan Pangan
f.	Kacang-kacangan	147,1	113,6	115,4	152,8	147,4	Dinas Ketahanan Pangan
g.	Gula	88,8	82,9	83,4	86,5	71	Dinas Ketahanan Pangan
h.	Sayur dan buah	104,5	104,4	104,5	105,6	111	Dinas Ketahanan Pangan
i.	lain-lain	47,9	25,5	37,9	37,9	27,1	Dinas Ketahanan Pangan
54.	Jumlah perusahaan yang diberikan bantuan mesin/peralatan dalam rangka pengembangan industri berbasistepung non gandum	-	-	3	3	7	Dinas Perindustria n
55.	Promosi dan kerjasama pada industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	Dinas Perikanan
56.	Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional (Kg/Kap/Tahun)	25,93	30,26	30,94	33,07	33,14	Dinas Perikanan
57.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.296,00	1.485,00	2.136,00	2.429,00	3.079,00	Dinas Perikanan
58.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.485,52	1.689,31	1.924,57	2.079,20	2.381,08	Dinas Perikanan
59.	Produksi Budidaya Rumput Laut	368,86	1.015,88	1.276,00	1.300,34	1.317,71	Dinas Perikanan
60.	Jumlah Kegiatan FORIKAN dalam Rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan (Kegiatan)	4	4	4	5	5	Dinas Perikanan
61.	Jumlah Peserta Pelaksanaan	562	532	1.117	1.232	382	Dinas Perikanan

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
	GEMARIKAN (Orang)						
62.	ketersediaan data harga kebutuhan pokok masyarakat (komoditi)	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Perdagangan
63.	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/pasar rakyat (unit pasar rakyat)	2	5	5	4	8	Dinas Perdagangan

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

3. Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan

Pilar 3 Mutu dan Keamanan pangan menurut rencana aksi nasional meliputi pengawasan regulasi dan standar gizi; pengawasan keamanan pangan segar; pengawasan keamanan pangan olahan; pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan promosi keamanan pangan.

Capaian kinerja pada pilar 3 mutu dan keamanan pangan di Kota Semarang secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 26
Capaian Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan Kota Semarang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Jumlah tenaga pengawas mutu dan keamanan pangan (orang)	-	-	-	-	97	Dinkes/ Dinas Ketahanan Pangan
2.	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM (pilar / odf)			88,5	97,96	100	Dinas Kesehatan
3.	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%)	81,73	82,92	88,97	90,37	91,72	Dinas Kesehatan
4.	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (%)			91	97,8	98	Dinas Kesehatan
5.	Persentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif	64	65	65	68	70	Dinas Dalduk KB

No	Indikator	Capaian					Instansi/ OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
6.	Presentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	80	80	80	85	90	Dinas Dalduk KB
7.	Presentase kelompok bina keluarga lansia (BKL) aktif	64	64	66	68	70	Dinas Dalduk KB
8.	Unmeetned	9,3	9,1	10,2	9,1	8,2	Dinas Dalduk KB
9.	TFR	2,34	2,3	2,2	2,2	2,1	Dinas Dalduk KB

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

4. Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Capaian kinerja pada pilar 4 perilaku hidup bersih dan sehat di Kota Semarang secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 27
Capaian Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kota Semarang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target Capaian					Instansi/OP D/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%)	96,33	92,85	98,68	96,4	105,77	Dinas Kesehatan
2.	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.	Kebijakan kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4.	Persentase kelurahan dengan Posbindu PTM (%)					40,11	Dinas Kesehatan
5.	Jumlah anak yang minum obat caceng					290.863	Dinas Kesehatan
6.	Kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7.	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	64,68	64,69	67,16	67,33	68,22	Dinas Kesehatan
8.	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber PHBS) (%)	90,9	90,93	92,29	94,65	96,23	Dinas Kesehatan
9.	Peningkatan mutu desa siaga - Proporsi desa/kelurahan siaga	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Target Capaian					Instansi/OP D/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
	aktif mandiri (%)						
10.	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	67,5	78	87,5	89	90	PDAM
11.	Persentasi peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	85,63	85,68	85,87	86,8	87,1	Dinas Perumahan dan Permukiman
12.	Jumlah kawasan SPAM masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikembangkan jaringannya (Kec)		16	16	16	16	Dinas Perumahan dan Permukiman
13.	Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Air Limbah Berbasis Masyarakat (SANIMAS)			16	16	16	DPU
14.	Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	15	15	20	22	24	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Jumlah peningkatan kinerja kaum perempuan dalam penanggulangan daur ulang sampah, pembuatan kompos dan pemanfaatan pekarangan (orang)	700	500	450	1.100	750	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Jumlah warga masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penataan lingkungan pemukiman (orang)	700	500	450	1.100	750	Dinas Lingkungan Hidup
17.	Jumlah sosialisasi terkait stunting pada media cetak, elektronik, dan media sosial (Melalui radio nasional, infografis, videografis, banner website, media cetak, PSA di Televisi)				37	37	Dinas Kesehatan
18.	Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah terkait Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kec) melalui:	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
19.	a. Melalui radio lokal (kali)			75	75	75	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Target Capaian					Instansi/OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
20.	b. Melalui konten cetak (lembar)			12	12	12	Dinas Kesehatan
21.	Rasio Puskesmas Terhadap 100.000 Penduduk (%)	37/1.57 5.068	37/1.70 1.172	37/1.72 9.428	37/1.75 3.092	37/1.66 8.578	Dinas Kesehatan
22.	Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk (%)	26/1.57 5.068	26/1.70 1.172	26/1.72 9.428	26/1.75 3.092	26/1.66 8.578	Dinas Kesehatan
23.	Rasio Dokter Spesialis Per 100. 000 Penduduk (jiwa)	745	828	897	1.001	1.068	Dinas Kesehatan
24.	Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk(jiwa)	1.798	1.940	2.143	2.304	2.556	Dinas Kesehatan
25.	Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk (%)						Dinas Kesehatan
26.	Cakupan Desa/ Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
27.	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)	36	35	36	36	37	Dinas Kesehatan
28.	Rasio Jumlah Tenaga Gizi dan Puskesmas	36/ 37	35/ 37	36/ 37	36/ 37	37/ 37	Dinas Kesehatan

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, 2018.

5. Pilar 5 Kelembagaan Pangan dan Gizi

Capaian kinerja pada pilar 5 koordinasi pembangunan pangan dan gizi di Kota Semarang secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 28
Capaian Pilar 5 Kelembagaan Pangan dan Gizi Kota Semarang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian					Instansi/OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (%)	257.606	357.525	379.701	393.385	429.338	Dindikcapil
2	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)	36	35	36	36	37	Dinas Kesehatan
3	Rasio Jumlah Tenaga Gizi dan Puskesmas	36/ 37	35/ 37	36/ 37	36/ 37	37/ 37	Dinas Kesehatan
4	Presentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif	78	78	78	78	78	Dinas Dalduk KB
5	Presentase kelompok bina keluarga balita (BKB) aktif	79	79	79	79	79	Dinas Dalduk KB

No	Indikator	Capaian					Instansi/OPD/ Urusan
		2014	2015	2016	2017	2018	
6	Presentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	68	70	80	85	90	Dinas Dalduk KB
7	Presentase kelompok bina keluarga lansia (BKL) aktif	73	77	78	79	79	Dinas Dalduk KB
8	Jumlah Koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan(DKP) dalam mendukung pangan gizi(Rakor)	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan

BAB II

RENCANA AKSI MULTISEKTOR

2.1. Metode dan Pendekatan

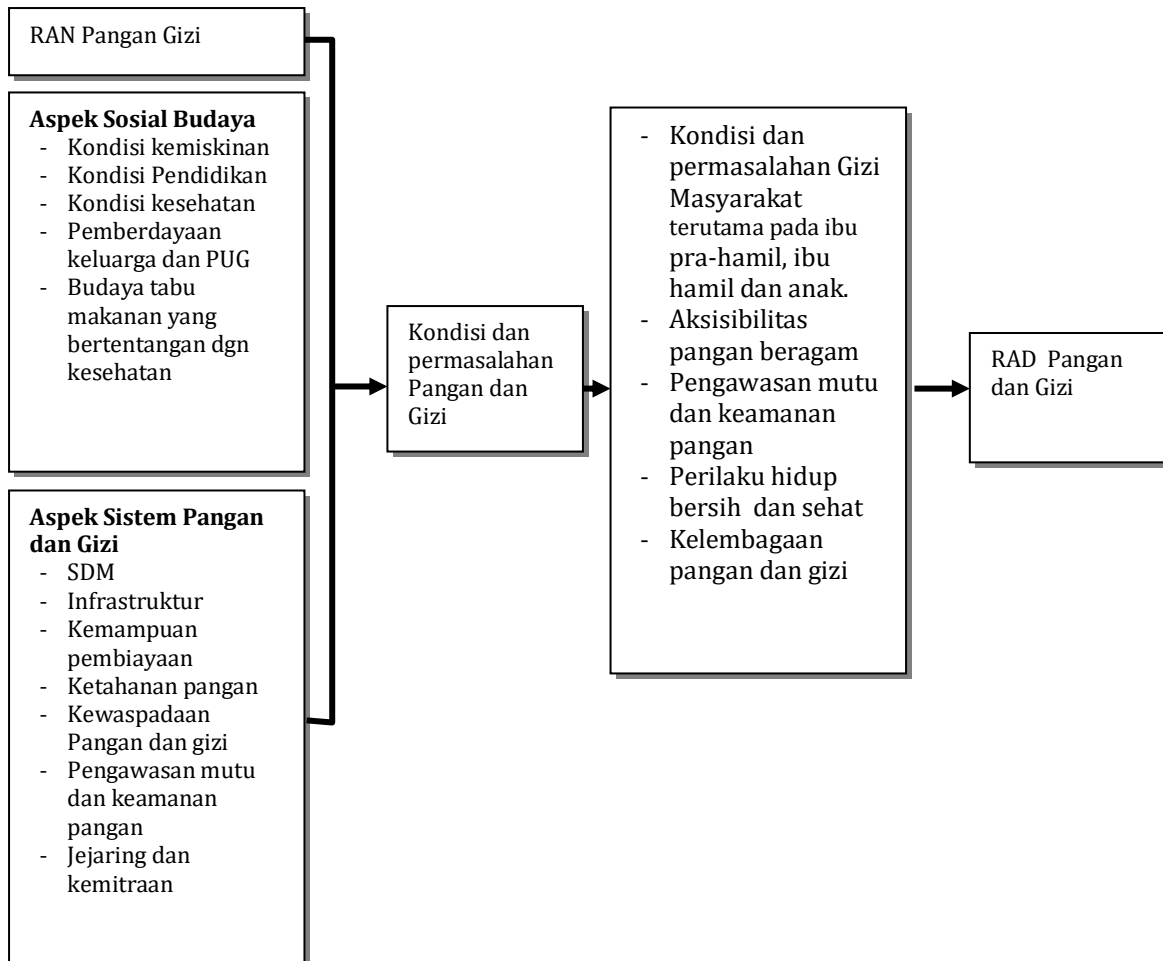
Penyusunan RAD Pangan dan Gizi diawali dengan melakukan kajian terhadap dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, identifikasi permasalahan pangan dan gizi yang ada di Kota Semarang. Identifikasi permasalahan pangan dan gizi tersebut meliputi berbagai aspek yaitu aspek sosial dan budaya termasuk budaya atau pola makan masyarakat serta aspek sistem pangan dan gizi yang ada dan berkembang di Kota Semarang. Aspek sosial budaya meliputi kondisi kemiskinan penduduk, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, kondisi pemberdayaan keluarga dan pengarusutaman gender, budaya tabu makanan yang bertentangan dengan kesehatan apabila ada. Sedangkan aspek sistem pangan dan gizi meliputi sumberdaya manusia (aparatur dan kader masyarakat), kondisi infrastruktur jalan, sarana transportasi, dan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan bendungan atau dam; kemampuan pembiayaan dari pemerintah kota; kondisi ketahanan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi; pengawasan mutu dan keamanan pangan dan jejaring serta kemitraan dalam ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.

Dari identifikasi permasalahan tersebut akan dapat diketahui kondisi dan permasalahan pangan dan gizi di Kota Semarang yang mencakup lima aspek yaitu :

1. Kondisi dan permasalahan gizi masyarakat terutama pada ibu prahamil, ibu hamil dan anak
2. Kondisi dan permasalahan aksesibilitas pangan beragam
3. Kondisi dan permasalahan pengawasan mutu dan keamanan pangan
4. Kondisi dan permasalahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
5. Kondisi dan permasalahan kelembagaan pangan dan gizi

Berdasarkan kondisi dan permasalahan berkaitan dengan lima aspek tersebut di atas disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan pangan dan gizi yang ada. RAD Pangan dan Gizi tahun 2017 -2021 ini berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif.

Gambaran kerangka pikir secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1
Diagram Alir Kerangka Pikir Penyusunan RAD Pangan dan Gizi
Kota Semarang

2.2. Faktor Determinan Pangan dan Gizi

1. Kebijakan Pangan dan Gizi

a. Keterkaitan Pangan dan Gizi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemenuhan pangan dan gizi pada masyarakat merupakan salah satu komitmen di dokumen Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemenuhan Pangan dan Gizi terdapat dalam Tujuan 2 SDGs atau TPB yaitu **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Pada tujuan tersebut terdapat 10 target yaitu:**

1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025
3. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
4. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025
5. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.
6. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah.
7. Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui manajemen dan

diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional.

8. Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, infrastruktur pedesaan, layanan penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, dalam rangka meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang
9. Mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Doha Development Round
10. Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya, dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada SDGs/TPB juga memperhatikan beberapa komitmen global, diantaranya *The World Health Assembly* pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*). Komitmen dalam *The World Health Assembly* pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan *wasting* pada balita kurang dari 5 persen.

b. Keterkaitan Pangan dan Gizi dengan RPJMN dan Kajian Teknokratik RPJMN 2020 - 2024

Permasalahan pangan merupakan salah satu hal yang menjadi sasaran strategis pembangunan nasional. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Pada dokumen RPJMN kebijakan umum kedaulatan pangan adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Kewajiban negara selain menyediakan pangan yang cukup, juga harus menyediakan pangan yang aman dan berkualitas sesuai dengan persyaratan kebutuhan gizi perorangan. Gizi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Agar dapat hidup sehat manusia membutuhkan asupan gizi yang cukup dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Manusia yang kebutuhan pangannya kurang tercukupi, biasanya asupan gizinya juga kurang. Di Indonesia banyak kasus kurang gizi bukan hanya disebabkan rendahnya pemahaman pola konsumsi yang sehat oleh masyarakat, melainkan adanya pola yang salah dalam mengelola kebijakan pangan dan pertanian. Kondisi ini juga menjadi permasalahan di Kota Semarang.

Komitmen Indonesia untuk memperbaiki permasalahan pangan dan gizi dituangkan dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi. Landasan kebijakan program pangan dan gizi dalam jangka panjang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Ketahanan pangan, kesehatan dan gizi termasuk dalam prioritas pembangunan di antara sebelas prioritas pembangunan nasional. Pendekatan multisektor dalam pembangunan pangan dan gizi meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan, dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, dan terjamin keamanannya (Bappenas, 2013).

Tahapan RPJPN dilaksanakan selama lima tahunan yang perencanaannya dirumuskan pada RPJMN. RPJMN tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah dapat menjadi landasan yang kuat untuk melaksanakan program pangan dan perbaikan gizi. Lebih operasional lagi, RPJMN diimplementasikan dalam Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra K/L) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan di tingkat daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Regulasi terkait pangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga fokus untuk memenuhi kecukupan dan kedaulatan pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional yang lebih baik pada tingkat komunitas, rumah tangga, dan individu. Upaya dan tanggung jawab pemerintah dalam perbaikan gizi dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut mendasari upaya perbaikan gizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan termasuk diperlukan adanya upaya lintas sektor. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 18 tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan juga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi merupakan regulasi penting dalam perbaikan pangan dan gizi. Regulasi ini sejalan dengan SUN Movement dan Indonesia telah menjadi anggota SUN Movement sejak Desember 2011. Sebagai tindak lanjut untuk mengoperasionalkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, telah dibentuk kelompok kerja (Pokja), dan disusun mekanisme monitoring dan evaluasi. Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan Pokja Gernas 1000 HPK dituangkan melalui Keputusan Menkokesra No 11 tahun 2014 yang anggotanya ditetapkan melalui SK Deputi bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas No 37/DI/06/2014.

Dalam kajian teknokratik RPJMN tahun 2020 - 2024 terdapat 7 agenda pembangunan tahun 2020 -2024 yaitu terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Rencana aksi pangan dan gizi ini mendukung pencapaian agenda nasional yaitu agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Agenda 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas diprioritaskan pada Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif danberdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai

tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda 2 pembangunan tahun 2020 – 2024 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dengan fokus Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan

SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Agenda 3 pembangunan 2020 – 2024 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan fokus Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

c. Keterkaitan Pangan dan Gizi dengan RPJMD Kota Semarang 2016 – 2021

Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut : **“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”**. Misi dalam rangka mencapai Visi diatas adalah:

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan

Berkualitas. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

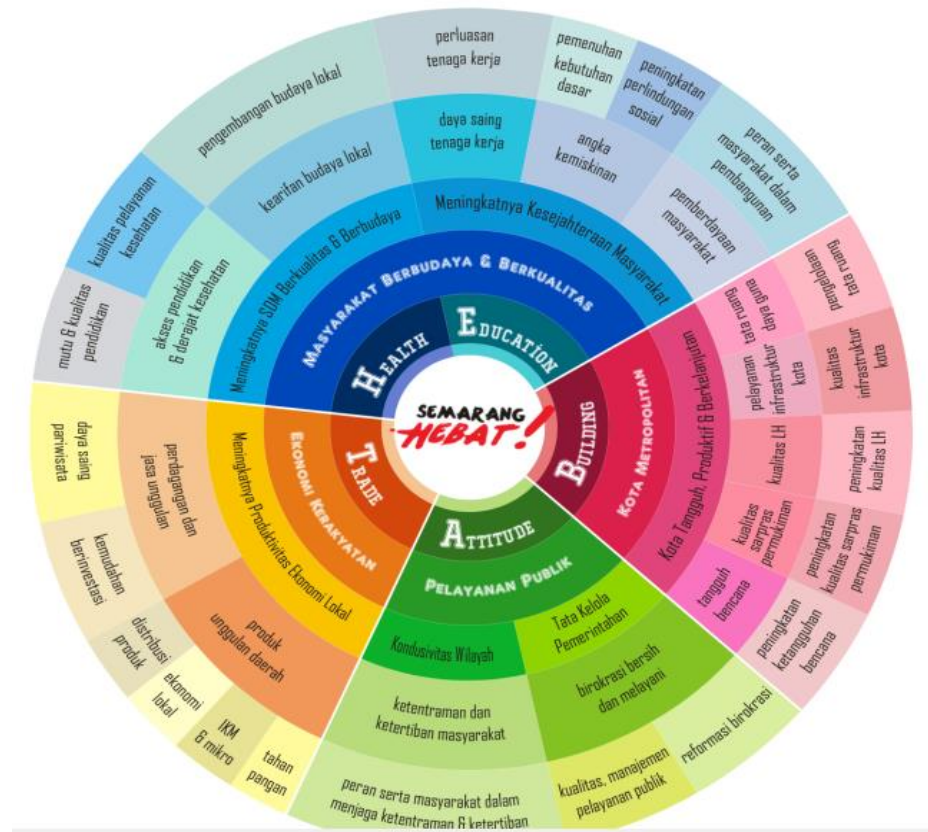
Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk

Meningkatkan Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Rencana aksi pangan dan gizi merupakan perencanaan dalam mencapai misi 1 dan misi 4 dokumen RPJMD 2016 – 2021.



Gambar 2. 2
Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kota Semarang

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana amanat dalam misi 1 RPJMD salah satu strategi yang akan dilakukan dengan cara peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian, hal ini selaras dengan pilar Pangan dan gizi yaitu perbaikan gizi masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pelaksanaan misi 4 RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021 dilaksanakan dengan

- 1) Peningkatan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui Peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- 2) Pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, memelihara

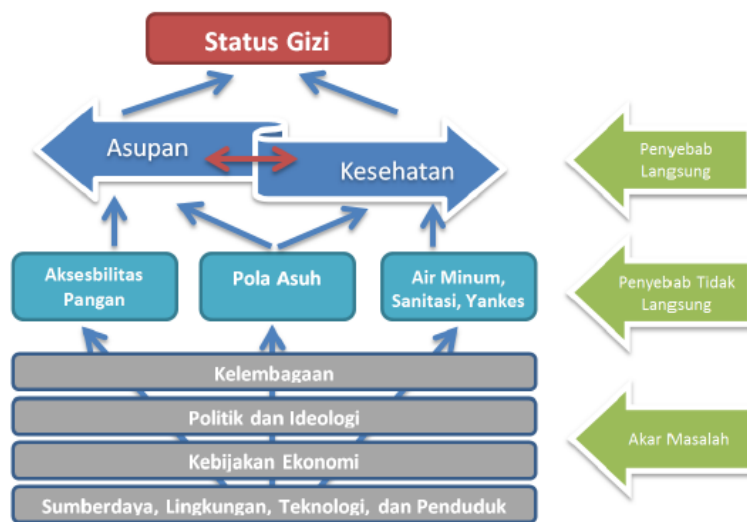
aktivitas usaha untuk dapat berkembang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengembangan produk ekonomi unggulan lokal diarahkan pada pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal.

2. Faktor penyebab yang mempengaruhi status gizi

Gambaran konsep terjadinya masalah gizi secara umum, dengan penekanan pada balita. Kerangka tersebut memperlihatkan jalur terjadinya suatu keadaan salah gizi/*malnutrition*. Faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi *malnutrition*, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan *malnutrition*. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain diluar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor penyebab langsung salah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor penyebab tidak langsung dan faktor dasar.

Faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, antara lain:

- a. ketahanan pangan keluarga yang menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga;
- b. pola asuh yang menentukan kecukupan zat gizi yang antara lain terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 bulan-2 tahun, dan penyiapan makanan secara higienis; dan
- c. pemanfaatan pelayanan kesehatan saat sakit dan akses terhadap lingkungan yang bersih.



Gambar 2. 3
Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Gizi

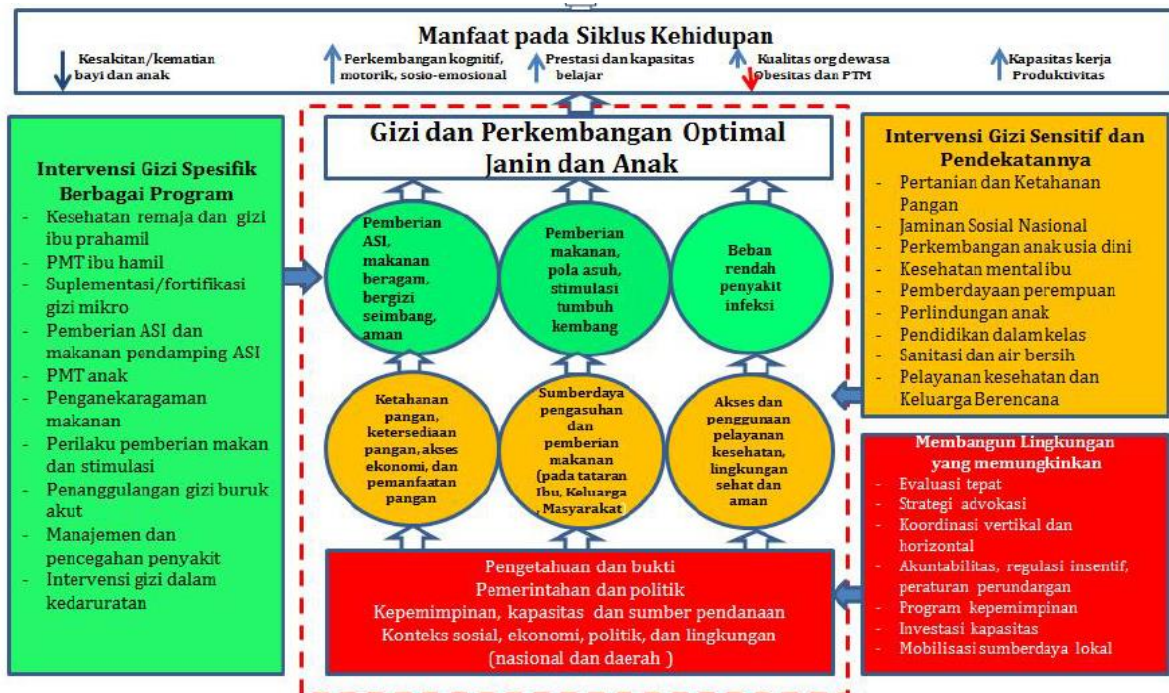
Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu unsur dari ketahanan pangan. Menurut Sawit dan Ariani bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Menurut FAO (1996) salah satu kunci terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh pangan. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran pangan. Hukum Working 1943 menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan

pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU Pangan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Beberapa peraturan lain yang sedang dalam proses penyusunan adalah PP tentang label dan iklan pangan, PP tentang keamanan mutu dan gizi pangan serta Peraturan Presiden tentang kelembagaan pangan nasional.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, disebutkan Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat. Stabilitas distribusi pangan didefinisikan sebagai kemampuan meminimalkan kesenjangan ketersediaan pangan terhadap permintaan konsumsi pangan, khususnya pada tahun atau musim sulit. Aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional, wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.310 kkal/kap/hari dan protein 57 (62,7) gram/kap/hari. Aspek ketersediaan dapat dipenuhi tidak hanya dari potensi domestik saja tetapi juga dari perdagangan antar daerah maupun impor dalam perdagangan luar negeri. Namun demikian akan sangat berbahaya jika suatu wilayah hanya menggantungkan aspek ketersediaan dari impor. Hal ini dikarenakan perdagangan pangan merupakan residual atas terpenuhinya kebutuhan domestiknya, sehingga berimplikasi pada pasar pangan yang cenderung bersifat *thin market*.



Sumber : RAN PG 2015 – 2019

Gambar 2. 4

Pendekatan Multisektor RAD-PG Berdasarkan RAN PG Tahun 2015 - 2019

Kota Semarang memiliki cakupan konsumsi kalori sampai dengan 2019 telah mencapai angka diatas target kemiskinan yaitu 1.400 kkal/kapita/hari. Intervensi kegiatan dalam memenuhi pangan dan meningkatkan gizi masyarakat adalah:

1. Meningkatkan produksi pangan alternatif
2. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan
3. Menjamin distribusi pangan
4. Menjaga keamanan pangan
5. Melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak
6. Meningkatkan kualitas ketersediaan asuan gizi pada kantin sekolah

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data terkait Kondisi pangan di Kota Semarang dan status gizi Kota Semarang
2. Pengumpulan permasalahan melalui FGD (*Focus Grop Disscussion*)
3. Penyusunan rencana aksi melalui workshop

2.3. Permasalahan

Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder berikut ini permasalahan terkait dengan ketahanan pangan dan gizi :

a. Pilar I Perbaikan gizi masyarakat

- 1) Masih ditemukannya gizi buruk, kasus stunting dan gizi lebih.
- 2) Pemahaman ibu hamil masih kurang dalam penyediaan makanan bergizi dan pemeriksaan kehamilan.
- 3) Belum optimalnya pemantauan tumbuh kembang anak.
- 4) Masih kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam penanganan persalinan (kualitas bidan dan sarpras puskesmas polindes, poskedes dan pustu).
- 5) Masih belum optimalnya cakupan bayi ASI Eksklusif.
- 6) Belum optimalnya peran Posyandu dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang balita.
- 7) Belum optimalnya pembinaan kantin sekolah menuju sekolah sehat.

b. Pilar II Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam

- 1) Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian beragam, penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan pemanfaatan pekarangan melalui kelompok tani, Gapoktan dan KWT.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan.
- 3) Ketersediaan pangan Kota Semarang sangat tergantung pada daerah sekitarnya.
- 4) Berkurangnya lahan pertanian berkelanjutan disebabkan alih fungsi lahan di perkotaan.
- 5) Belum optimalnya produksi dan pengolahan hasil perikanan, baik hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

c. Pilar III Mutu dan Keamanan Pangan

- 1) Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.
- 2) Belum semua industri dan pengolahan pangan memiliki izin yang dikeluarkan Dinas Kesehatan.
- 3) Belum optimalnya pengawasan bahan pangan yang beredar dan kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya bahan pangan yang sehat.

d. Pilar IV – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- 1) Belum semua rumah tangga yang ber PHBS.
- 2) Masih belum semua kelurahan STBM.
- 3) Masih ditemukannya kasus penyakit karena PHBS yang kurang (TBC, diare, DBD).
- 4) Belum semua rumah tangga memiliki akses air minum/bersih dan sanitasi layak.

e. Pilar V- Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

- 1) Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan (DKP).
- 2) Belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanganan gizi dan pangan.
- 3) Belum optimalnya peran dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan dan peningkatan pangan dan gizi.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Aksi Pangan Gizi Kota Semarang adalah Meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dan menurunnya kasus balita stunting.

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Rencana Aksi Pangan Gizi Kota Semarang
Tahun 2020- 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat		PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	89	90	91	92	93
		% Gizi Buruk	%	0,30	0,30	0,25	0,25	0,20
	Meningkatnya ketersediaan pangan	Penyediaan cadangan pangan	ton	60	60	60	60	60
	Menurunnya kasus balita stunting	% balita stunting	%	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00

Indikator yang ingin dicapai dengan perbaikan pangan dan gizi Kota Semarang adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing

tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi Kota Semarang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Pangan Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2024	Instansi/OPD/ Urusan
1	produksi padi	ton	37.500	37.500	Dinas Pertanian
2	produksi jagung	ton	4500	4500	Dinas Pertanian
3	Produksi daging sapi/ kerbau	ton	2.424,4	2.600	Dinas Pertanian
4	Produksi daging ayam buras	ton	1,021	1320	Dinas Pertanian
5	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	kawasan	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
6	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kelompok	65	95	Dinas Ketahanan Pangan
7	Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah	ton	54,8	60	Dinas Ketahanan Pangan
8	Jumlah lumbung yang difasilitasi	lumbung	15	16	Dinas Ketahanan Pangan
9	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang terfasilitasi	kawasan	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
10	Konsumsi kalori mencapai kkal/kapita/hari	(kkal/kap/th)	3100	3100	Dinas Ketahanan Pangan
11	Konsumsi Protein/Kap/hr	gram	53,6	57	Dinas Ketahanan Pangan
12	Skor PPH	skor	87,7	93	Dinas Ketahanan Pangan
13	Konsumsi energi	(Kkal/Kp/hari)	2.006,1	2.000,0	Dinas Ketahanan Pangan
14	Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional	Kg/Kap/Tahun	33,14	39	Dinas Perikanan
15	Produksi Perikanan Tangkap	ton	3.079	3.700	Dinas Perikanan
16	Produksi Perikanan Budidaya	ton	2.381,08	2.500,00	Dinas Perikanan

Sumber data : Data dari PD Kota Semarang 2018 (diolah)

Indikator utama pada perbaikan gizi adalah:

- a. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)
- b. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
- c. Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita
- d. Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak dibawah dua tahun
- e. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
- f. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup
- g. Persentase Balita Gizi Buruk
- h. Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Adapun capaian target indikator utama pada perbaikan gizi untuk tahun 2024 di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi Kota Semarang

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2024	Instansi/OPD/ Urusan
1	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)	%	2,97	2,20	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	2,43	2,00	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita	%	2,73	2,00	Dinas Kesehatan
4	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak dibawah dua tahun	%	2,37	2,00	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
6	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup		6,38	5,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,38	0,30	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 Kelahiran Hidup		7,46	6,00	Dinas Kesehatan

Sumber data : Data dari PD Kota Semarang 2018 (diolah)

2.5. Pendekatan Multisektor

Pendekatan multisektor dalam capaian target kinerja pangan dan gizi sangat diperlukan. Berdasarkan capaian nasional (2017) diketahui bahwa perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam stunting pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan (RAN PG, 2017).

Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain terkait erat dengan program-program perlindungan sosial, pembangunan dalam bidang pertanian, serta perbaikan cakupan pelayanan air bersih dan peningkatan sanitasi lingkungan, dan capaian program Keluarga Berencana (KB). Oleh Karena itu pelaksanaan RAD PG Kota Semarang melibatkan peran serta segenap pemangku kepentingan peningkatan pangan dan gizi, meliputi : perangkat daerah (pengampu kewenangan kesehatan, pertanian dan pangan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, perikanan dan kelautan) serta kalangan dunia usaha yang terkait.

Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan permasalahan gizi, stunting dan kesehatan. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pendorong yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain : peningkatan kesadaran masyarakat, aparat pemerintah dan dukungan kepemimpinan daerah yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan baik dari APBD maupun swadya masyarakat/dunia usaha. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu BERGERAK BERSAMA dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut ini upaya intervensi dan arahan program intervensi yang akan dilaksanakan oleh multisektor dalam peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

Tabel 2. 4
Upaya dan Program Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif

No	Upaya Intervensi	Program Intervensi yang Terkait
1	Intervensi Gizi Spesifik dan Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan remaja dan gizi ibu prahamil; b. PMT ibu Hamil; c. Suplementasi /fortifikasi gizi mikro; d. Pemberian ASI dan makanan pendamping ASI; e. PMT anak; f. Penganekaragaman makanan; g. Perilaku pemberian makan dan stimulasi; h. Penganekaragaman makanan; i. Penanggulangan gizi buruk akut; j. Manajemen dna pencegahan penyakit; k. Intervensi gizi dalam kedaruratan.
2	Intervensi Gizi Sensitif dan Pendekatannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian dan ketahanan pangan; b. Jaminan Sosial Nasional (JSN); c. Perkembangan anak usia dini; d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. Pendidikan formal; f. Pemenuhan sanitasi dan air bersih; g. Pelayanan kesehatan dan KB.
3	Membangun Lingkungan yang Menungkinkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja secara tepat tentang capaian RAD PG; b. Strategi advokasi; c. Koordinasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; d. Akuntabilitas, regulasi insentif dan peraturan perundangan; e. Peningkatan kapasistas aparat pelaksana; f. Mobilisasi sumberdaya lokal; g. Komitmen Pimpinan Daerah dan penganggaran;

2.6. Penguatan Kelembagaan RAD PG

Penguatan RAD-PG merupakan kebijakan yang strategis untuk dilaksanakan di Kota Semarang dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat legal aspek RAD-PG
 - a. Membentuk tim koordinasi di tingkat Kota Semarang yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Tim RAD PG tersebut. Tim koordinasi terdiri dari : (a) Tim Pengarah dan (2) Tim Teknis;
 - b. Menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Walikota (Perwal) Kota Semarang dan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Derah.

2. Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Sosialisasi RAD-PG kepada segenap pemangku kepentingan di tingkat Kota Semarang dengan mengutamakan peran serta perangkat daerah, kalangan dunia usaha dan warga masyarakat.
 - b. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya.
3. Implementasi

Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor, meningkatkan peran serta masyarakat dan pendekatan lain yang tepat.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin dari perangkat daerah (PD) dan hasil survei;
 - b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor pencapaian RAD PG;
 - c. Kunjungan lapangan secara berkala;
 - d. Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan RAD-PG Kota Semarang sebagai bagian tidak terpisahkan dari capaian kinerja RKPD dan RPJMD Kota Semarang.

2.7. Arahan Kegiatan Rencana Aksi Setiap Pilar

Arahan kegiatan rencana aksi setiap Pilar Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:
 - a. promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
 - b. pemberian suplementasi gizi;
 - c. pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
 - d. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
 - e. jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi;
dan
 - f. pendidikan anak usia dini (PAUD) secara holistik dan integratif.
2. Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:

- a. Peningkatan produksi pangan di Kota Semarang;
 - b. Penyediaan pangan berbasis sumber daya pangan lokal;
 - c. Distribusi pangan secara merata;
 - d. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin,
 - e. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
3. Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:
- a. Pengawasan regulasi dan standar gizi;
 - b. Pengawasan keamanan pangan segar;
 - c. Pengawasan keamanan pangan olahan dan proses produksi bersih;
 - d. Pengawasan pangan, sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
 - e. Promosi keamanan pangan.
4. Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:
- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - c. Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi;
 - d. Penerapan kawasan tanpa rokok (sekolah, sarana kesehatan dan angkutan umum) ; dan
 - e. Penerapan perilaku hidup sehat dan bersih.
5. Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:
- a. Perencanaan pangan dan gizi;
 - b. Penguatan peranan lintas sektor;
 - c. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
 - d. Pelibatan pemangku kepentingan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. Penyusunan dan penyampaian laporan.

2.8. Target Indikator Setiap Pilar

Adapun capaian target indikator untuk setiap pilar dalam RAD Pangan dan Gizi sampai dengan tahun 2024 di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Pilar 1 – Perbaiki gizi masyarakat.

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/ Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)	2,97	2,90	2,80	2,75	2,50	2,40	2,20	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)	2,43	2,40	2,30	2,25	2,20	2,10	2,00	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita (%)	2,73	2,50	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00	Dinas Kesehatan
4	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak dibawah dua tahun (%)	2,37	2,30	2,20	2,10	2,00	2,00	2,00	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
6	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	6,38	6,20	6,10	6,00	5,00	5,00	5,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase Balita Gizi Buruk	0,38	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,2	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 Kelahiran Hidup	7,46	7,56	7,50	7,00	6,80	6,50	6,00	Dinas Kesehatan

2. Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam.

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/ Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tercapainya produksi padi (ton)	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	Dinas Pertanian
2	Tecapainya produksi jagung (ton)	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	Dinas Pertanian
3	Produksi daging sapi/kerbau (ton)	2.424,4	2500	60	2.600	2.600	2.600	2.600	Dinas Pertanian
4	Produksi daging ayam buras (ton)	1,021	1100	1200	1250	1275	1300	1320	Dinas Pertanian
5	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan (kawasan)	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
6	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kelompok)	65	70	75	80	85	90	95	Dinas Ketahanan Pangan
7	Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (ton)	54,8	55	60	60	60	60	60	Dinas Ketahanan Pangan
8	Jumlah lumbung yang difasilitasi (lumbung) (kumulatif)	15	15	16	16	16	16	16	Dinas Ketahanan Pangan
9	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang terfasilitasi (kawasan) (komulatif)	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
10	Konsumsi kalori mencapaikkal/kapita/hari (kkal/kap/th)	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	Dinas Ketahanan Pangan
11	Konsumsi Protein/Kap/hr(gram)	53,6	55	55,6	56	57	57	57	Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/ Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12	Skor PPH	87,7	88	89	90	91	92	93	Dinas Ketahanan Pangan
13	Konsumsi energi (Kkal/Kp/hari)	2.006,1	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	Dinas Ketahanan Pangan
14	Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional (Kg/Kap/Tahun)	33,14	34	35	36	37	38	39	Dinas Perikanan
15	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.079	3.100	3.200	3.300	3.500	3.600	3.700	Dinas Perikanan
16	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.381,08	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dinas Perikanan

3. Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan.

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/ Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan
2	Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT (%)	80,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	BBPOM/ Dinkes
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM (pilar / odf)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%)	91,72	92	93	94	95	95	95	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/ Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (%)	98	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Persentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Dalduk KB
7	Persentase kelompok bina keluarga balita (BKB) aktif	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Dalduk KB

4. Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kebijakan kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	68,22	69	70	71	72	73	74	Dinas Kesehatan
3	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber PHBS) (%)	96,23	98	99	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Peningkatan mutu desa siaga - Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	92%	93	94	95	95	95	95	PDAM
6	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Jumlah kawasan SPAM masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikembangkan jaringannya	94% atau 16 kecamatan	95% atau 16 kecamatan	96% atau 16 kecamatan	97% atau 16 kecamatan	98% atau 16 kecamatan	98% atau 16 kecamatan	98% atau 16 kecamatan	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	24	25	26	27	28	29	30	Dinas Lingkungan Hidup

5. Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

No	Indikator	Kondisi Awal	Target						Instansi/ OPD/ Urusan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (%)	84	86	88	90	91	92	93	Dindikcapil
2	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)	37	37	37	37	37	37	37	Dinas Kesehatan
3	Jumlah Koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan(DKP) dalam mendukung pangan gizi (Rakor)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan

2.9. Kebutuhan Kegiatan Setiap Pilar

Adapun kegiatan yang dibutuhkan setiap pilar dalam RAD Pangan dan Gizi sampai dengan tahun 2024 di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat.

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Satuan	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Masih ditemukannya kasus BBLR	1	Pemberian Fe Pada Ibu Hamil	Ibu Hamil	Orang	semua ibu hamil					Dinas Kesehatan
	2	Pendampingan ibu hamil dalam meningkatkan asupan gizi	Ibu Hamil	Orang	semua ibu hamil					Dinas Kesehatan
	3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil	Ibu Hamil	Orang	semua ibu hamil					Dinas Kesehatan
	4	Pendidikan Kesehatan reproduksi remaja	PIK KRR	kelompok	16	16	16	16	16	Dinas Dalduk KB
		Pendidikan Kesehatan reproduksi remaja	SAKA	Orang	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan
	5	Pendampingan ibu nifas	Ibu Hamil	Orang	semua ibu hamil					Dinas Kesehatan
	6	Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas PONED	Jumlah Puskesmas	unit	27	28	30	35	37	Dinas Kesehatan
	7	Pembinaan dokter praktek swasta dan bidan swasta	Jumlah DPS dan BPS	Orang	semua DPS dan BPS					Dinas Kesehatan
	Gerakan Sayang Ibu	Ibu Balita	Kelurahan	177	177	177	177	177	Dinas Kesehatan	
Masih ditemukannya kasus stunting;	1	Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan penimbangan dan pengukuran bayi dan balita	Kader Kesehatan	Orang	177	177	177	177	177	Dinas Kesehatan
	2	Pendampingan IMD	Ibu Hamil	Orang	semua ibu hamil					Dinas Kesehatan
	3	pemberian ASI Eksklusif	Ibu Bayi	Orang	semua ibu hamil					Dinas Kesehatan

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Satuan	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
	4	Pemeriksaan tumbuh kembang balita secara rutin (monev Posyandu)	Ibu balita	Posyandu	semua Posyandu					Dinas Kesehatan
	5	Peningkatan pemahaman bagi calon pengantin tentang penting gizi pada ibu calon bayi, pada saat kehamilan dan menyusui	calon pengantin	orang	semua Calon Pengantin					Dinas Kesehatan, Kemenag
	6	Peningkatan pemahaman bagi pengelola PAUD, tentang tumbuh kembang anak dan pola asuh	Pengelola PAUD	Orang	semua Pengelola PAUD					Dinas Pendidikan
	7	Peningkatan pemahaman bagi pengelola TPA tentang tumbuh kembang anak dan pola asuh	Pengelola TPA	Orang	semua Pengelola TPA					Dinas Pendidikan
	8	Peningkatan kualitas kader gizi di masyarakat	Kader Gizi	orang	37	37	37	37	37	Dinas Kesehatan
	9	Pembinaan posyandu	Posyandu	Orang	semua Posyandu					DP3A
Belum semua sekolah melakukan pemantauan tumbuh kembang dan pola asuh	1	Pembinaan kantin sekolah	Kantin Sekolah	Orang	196	196	196	196	196	Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Pendidikan
	2	Pembinaan UKS	Sekolah	Orang	semua Sekolah SD dan SMP					Dinas Kesehatan & Pendidikan
	3	Pembinaan sekolah sehat	Sekolah	unit	semua Sekolah SD dan SMP					Dinas Kesehatan & Pendidikan
	4	Pemeriksaan anak sekolah secara rutin	Sekolah	Orang	semua Sekolah SD dan SMP					Dinas Kesehatan & Pendidikan

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Satuan	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Masih ditemukannya penduduk miskin yang memiliki bayi dan balita rawan stunting dan gizi tidak baik	1	Pemberian bantuan PKH Bumil dan Usia Dini	orang	5838	6338	6838	7338	7838	8328	Dinas Sosial
		Lanjut Usia	orang	6566	7066	7566	8066	8566	9066	
		Disabilitas	orang	154	157	160	164	167	170	
	2	Pemberian Jaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	semua penduduk	Orang	semua penduduk kota semarang					Dinas Kesehatan
	3	Pemberian bantuan beras melalui ATM beras	Warga miskin yg blm mndpt bantuan rastra, PKH	orang	450	550	650	750	850	Dinas Ketahanan Pangan
Belum semua PMKS diluar panti yang mendapat jaminan pemeliharaan	1	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS diluar panti								Dinas Sosial
	a	Anak terlantar	anak	orang	10	10	11	11	12	
	b	Lansia Terlantar	lansia	orang	23	23	24	24	25	
	c	Disabilitas terlantar	disabilitas	orang	6	7	8	9	9	
Belum semua keluarga memahami pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang balita dan remaja dengan baik	1	Pembinaan BKR dan BKB	semua keluarga	orang	semua keluarga remaja dan balita					Dalduk KB
	2	Pembinaan 1000 HPK	Ibu nifas	orang	semua ibu bayi					Dalduk KB,Dinas Kesehatan
	3	Pembinaan keluarga tentang penyediaan makanan bergizi dan berimbang	keluarga	orang	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	4	Peningkatan Aktivitas Fisik pada anak mencegah obesitas	semua anak sekolah	anak	semua anak sekolah					Dinas Pendidikan, DP3A

2. Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam.

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian beragam dengan bibit unggul/varits baru, penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan pemanfaatan pekarangan melalui kelompok tani, gapoktan dan KWT	1	Pembinaan Petani	petani	kelompok						Dinas Pertanian
	a	pemanfaatan teknologi	poktan	kelompok	7	8	10	12	15	
	b	pembibitan	poktan	kelompok	2	2	4	6	8	
	c	peningkatan ketrampilan	poktan	kelompok	580	580	600	600	600	Dinas Pertanian
	2	Penyusunan kajian sawah berkenlanjutan	petani	dok			1	1	1	
	3	Pembinaaan KWT								Dinas Pertanian
	a	pemanfaatan pekarangan	KWT	kelompok	55	67	79	91	103	
	b	peningkatan ketrampilan KWT	KWT	orang	50	50	75	75	100	
	4	Peningkatan jejaring dalam penguatan produksi pertanian	poktan	kelompok	6	6	8	10	12	Dinas Pertanian
	5	Pembinaan Peternak								Dinas Pertanian
	a	pemanfaatan teknologi	poktan	kelompok	4	4	6	8	10	
	b	pembibitan	poktan	kelompok			1	1	1	
	c	peningkatan ketrampilan	poktan	orang	50	50	75	100	125	
	6	pengembangan pertanian perkotaan	poktan	kelompok	69	85	101	117	133	Dinas Pertanian
	7	Pengawasan dan monitoring distribusi peredaran barang kebutuhan pokok	Distribusi pangan	kali		48	48	48	48	48
8	Pembangunan embung	Areal persawahan	unit		1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum
9	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	luas jaringan	ha		1980,8	2005,6	2030,3	2055,1	2079,8	Dinas Pekerjaan Umum

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Belum optimalnya peningkatan bahan pangan beragam, masih tingginya konsumsi beras per kapita (lebih kurang 100 Kg/ per kapita, tingginya lemak, gula dan konsumsi ikan, susu dan buah-buahan masih rendah	1	Penganekaragaman pangan bahan lokal	Masy/ PKK	kali	20	20	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan
	2	Peningkatan konsumsi makan ikan	Masyarakat	Keg	9	10	11	12	13	Dinas Perikanan
	3	Pembinaan pengolahan produk perikanan	Kelompok	kelompok	25	30	35	40	45	Dinas Perikanan
	4	Pengemangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Masyarakat	kelompok	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan
	5	Pembinaan kelompok KRPL	Kelompok KRPL		15	20	25	30	35	Dinas Ketahanan Pangan
Belum optimalnya stabilitas harga		Pemantauan harga kebutuhan pokok dipasar tradisonal	pasar	pasar	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	Dinas Perdagangan

3. Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan.

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan pengawasan dan perlindungan konsumen atas bahan pangan beredar belum optimal karena terbatasnya sumberdaya aparatur.	1	Pemeriksaan bahan makanan	TPM (Jasa boga, DAM, Resto)	TPM Baru (satu lokasi 5 sampel)	100 sampel	150 sampel	200 sampel	250 sampel	300 sampel	Dinas Kesehatan
	a	Peningkatan kapasitas penjamah makan	Jumlah pembinaan TPM (Boga, Resto, DAM)	400 TPM	80 TPM	80 TPM	80 TPM	80 TPM	80 TPM	Dinas Kesehatan
	b	Pemberian Ijin PIRT	Masyarakat Kota Semarang	385	404	424	445	467	490	Dinas Kesehatan

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Pembinaan Pasar Sehat	Pasar Tradisional Kota Semarang	41 Pasar Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	3	Peningkatan kapasitas aparaturnya dalam pengawasan bahan pangan yang beredar	Kader keamanan Pangan	Orang/ Kader	160	200	240	280	320	Dinas Ketahanan Pangan, Kesehatan, Perdagangan
	5	Peningkatan produk hewan yang ASUH	Jenis	peternak	semua Peternak					Dinas pertanian
	6	Pencegahan penularan zoonosis	Jenis	peternak	semua Peternak					Dinas Pertanian
	7	Peningkatan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada makanan	Pasra tradisional, kantin sekolah, PKL pasar Modern		184	184	184	184	184	Dinas Perdagangan, ketahanan pangan, kesehatan

4. Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif belum optimal (tahun 2018) sebesar 68,22%.	1	Pembinaan keluarga dan suami dalam pemberian ASI Eksklusif	Ibu Bayi	Orang	semua ibu hamil					Dinas Kesehatan
	2	Peningkatan pojok laktasi di tempat-tempat Umum	Pasar, Terminal, perkantoran	unit	semua unit TTU					Dinas Kesehatan

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan pelayanan air bersih bagi kelompok masyarakat di permukiman padat belum optimal;	1	Pemeriksaan kualitas air disumber sumber air bersih	Sumber Air Bersih (SAB)	37 Puskesmas	37 SAB	74 SAB	111 SAB	148 SAB	185 SAB	Dinas Kesehatan
Belum semua kelurahan STBM	1	Pembinaan Kelurahan STBM	Seluruh Kelurahan di Kota Semarang	177 Kelurahan	37 Kel	37 Kel	37 Kel	37 Kel	29 Kel	Dinas Kesehatan
	2	Peningkatan Pengawasan menuju ODF Berkelanjutan	Seluruh Kelurahan di Kota Semarang	177 Kelurahan	37 Kel	37 Kel	37 Kel	37 Kel	29 Kel	Dinas Kesehatan
	3	Penyediaan tempat cuci tangan ditempat-tempat umum	Sarana CTPS di Tempat tempat Umum di Kota Semarang	1112 TTU	1112	1112	1112	1112	1112	Dinas Kesehatan
	5	Pengelolaan sampah dengan 3R	kelurahan	kelompok	110	130	140	150	177	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Pembangunan pengelolaan limbah rumah tangga yang terstruktur	keluarga	unit	100	200	200	200	200	Dinas Perumahan dan pemukiman

5. Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

Masalah	No	Kebutuhan Kegiatan	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tahun					Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Belum optimalnya peran lintas sektor dan dunia usaha	1	Koordinasi penguatan Pangan dan Gizi Lintas Sektor	OPD Terkait	kali	2	2	2	2	2	Bappeda
	2	Koordinasi Forum CSR dalam penguatan pangan dan gizi	177 kel 17 PT 16 Kec 90 CSR	kali	3	3	3	3	3	Bappeda
	3	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Stakeholder Ketahanan Pangan	Kali	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan pangan
	4	Pengintegrasian perencanaan pangan dan gizi kedalam perencanaan Kota (Tahunan dan Lima Tahunan)	OPD Terkait	OPD	14 OPD	14 OPD	14 OPD	14 OPD	14 OPD	Bappeda
	5	Monitoring dan Evaluasi	OPD Terkait	kali	2	2	2	2	2	Bappeda
		Rakor TPID	OPD Terkait	kali	2	2	2	2	2	Sekda bagian Perekonomian

BAB III

KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

3.1 Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi

1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional Bidang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Lingkup penyelenggaraan pangan mencerminkan luasnya cakupan pembangunan pangan nasional, dan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkannya.

Menurut Undang-Undang Pangan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pemenuhan pangan tersebut bersumber dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Impor pangan merupakan upaya terakhir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat apabila kebutuhan pangan tersebut benar-benar tidak dapat dipenuhi dari kedua sumber pangan nasional.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 disebutkan bahwa Peningkatan Kedaulatan Pangan menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan ke depan. Disebutkan dalam dokumen tersebut bahwa Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Kebijakan ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem

pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangun.

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan nasional, maka sasaran utama yang ingin diwujudkan terkait dengan bidang pangan dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedele diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. Sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein ditargetkan sebesar 18,7 juta ton pada tahun 2019. Produksi garam ditargetkan untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga.
- 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistem Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan.
- 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- 4) Terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan. Kelimpahan sumberdaya ikan ini dipertahankan dengan mewujudkan manajemen sumberdaya dan kawasan perikanan berkelanjutan.
- 5) Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- 6) Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.

- 7) Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- 8) Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Tabel 3. 1
Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2014-2019

Komoditi	2014 (baseline)	2019	Rata-Rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)
1. Produksi			
a. Padi (juta ton)	70,6	82,0	3,03
b. Jagung (juta ton)	19,13	24,1	4,7
c. Kedelai (juta ton)	0,92	1,92	16,15
d. Gula (juta ton)	2,6	3,8	8,25
e. Daging Sapi (ribu ton)	452,7	755,1	10,8
f. Ikan (di luar rumput laut) – juta ton	12,4	18,7	8,5
g. Garam (juta ton)	2,5	3,3	7,2
2. Konsumsi			
a. Konsumsi kalori (Kkal)	1.967	2.150	-
b. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	38,0	54,5	7,4
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	92,5	-

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, yaitu:

- 1) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri;
- 2) Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan;
- 3) Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat;
- 4) Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan;
- 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional Bidang Gizi Dan KIA

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang

hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini. Masalah kekurangan gizi dan masalah kelebihan gizi menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (underweight) menjadi 15% dan prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 32% pada tahun 2014. Hasil Riskesdas dari tahun 2007 ke tahun 2013 menunjukkan fakta yang memprihatinkan dimana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%, stunting juga meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%, sementara wasting (kurus) menurun dari 13,6% menjadi 12,1%. Riskesdas 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram menurun dari 11,1% menjadi 10,2%.

Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan (100 HPK) seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi *stunting*, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-*Scaling Up Nutrition*) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintegrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Tidak hanya terjadi pada usia balita, prevalensi obesitas yang meningkat juga terjadi di usia dewasa. Terbukti dari perkembangan prevalensi obesitas sentral (lingkar perut >90 cm untuk laki-laki dan >80 cm untuk perempuan) tahun 2007 ke tahun 2013 antar provinsi. Untuk tahun 2013, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (39,7%) yaitu 2,5 kali lipat dibanding prevalensi terendah di Provinsi NTT (15,2%). Prevalensi obesitas sentral naik di semua provinsi, namun laju kenaikan juga bervariasi, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Maluku dan Sumatera Selatan. Mencermati hal tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta PHBS menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Sasaran Status Pembangunan Kesehatan RPJMN 2015-2019

Indikator	Status Awal	Target 2019
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	306
b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17,0
d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28,0

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:

- 1) Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
- 2) Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
- 3) Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
- 5) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
- 6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
- 7) Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 9) Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 10) Memperkuat Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi

- 11) Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
- 12) Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

3.2 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:

a. Pre service training

Kegiatan *pre service training* yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan atau gizi dalam kurikulum rumpun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bisa dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.

b. On the job/ in service training

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1000 HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1000 HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti inisiasi menyusui dini (IMD) dan pembuatan MP ASI, STBM, penganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD, kesehatan reproduksi.

Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat pusat daerah. Materi untuk *on the job training* disediakan oleh tim khusus yang dikoordinasikan oleh Pokja Pelatihan Gernas 1000 HPK di Kota Semarang.

2. Kebijakan

Kerangka intervensi *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

1. Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh dinas kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:

- a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan pada anak balita bermasalah gizi,
- b. pemberian obat cacing pada anak, pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap; dan
- c. Promosi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif serta konsumsi garam beryodium.
- d. Pemeriksaan rutin melalui penimbangan bayi di Posyandu

2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut: menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;

- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;

- c. Meningkatkan rumah tangga PHBS
- d. Menyediakan rumah sehat
- e. melakukan keaneragaman pangan dari bahan lokal;
- f. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- g. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- h. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- i. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- k. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja;
- l. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- m. Peningkatan konsumsi makan ikan

Kedua kerangka intervensi *stunting* diatas menjadi kegiatan prioritas dalam mencegah *stunting* dan gizi buruk.

3.3 Peran Sektor Non Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

1. Peran dunia usaha dilaksanakan melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) digunakan untuk memberikan tambahan makanan bagi gizi balita dan ibu hamil, peningkatan kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), peningkatan ketrampilan pemanfaatan pekarangan, penguatan kemandirian pangan, selain itu juga dapat melakukan investasi Kota Semarang terkait dengan pengolahan makanan
2. Peran perguruan tinggi dapat berperan serta melalui penelitian, program pengabdian pada masyarakat (PPM), laboratorium sosial dan kelompok binaan dengan melibatkan baik dosen maupun mahasiswa dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, perbaikan gizi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pangan dan gizi serta kesehatan umum lainnya.
3. Peran LSM yaitu meningkatkan pendampingan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan swadaya masyarakat, baik tentang PHBS,

perbaikan gizi dan penguatan kemandirian pangan dalam masyarakat, pemasyarakatan piring makanku dan lain-lain.

4. Peran Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan organisasi profesi lainnya dapat meningkatkan kesadaran, ketrampilan dan swadaya masyarakat dalam penyediaan gizi berimbang dan Germas.
5. Media Massa memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyebarkan informasi dan praktek baik (lesson learn) mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat Kota Semarang.
6. Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat (antara lain : PKK, Forum Kota Sehat Kota Semarang, FKK, Karang Taruna, Komda Lansia, Forum Posyandu) dapat berperan aktif dalam peningkatan kesadaran dan ketrampilan masyarakat dalam penyediaan gizi berimbang dan ketahanan pangan secara swadaya masyarakat.

3.4 Pembiayaan

Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, dana kelurahan dan atau sumber-sumber lain seperti Dana CSR, mitra pembangunan, dan sumber lain sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana kelurahan dalam rangka menurunkan kasus stunting pada balita. Kegiatan yang didanai adalah pemberian makanan tambahan, pembangunan MCK, perbaikan sumber air bersih/minum, kampanye hidup sehat, pelatihan ketrampilan pemanfaatan pekarangan, PHBS, pengelolaan sampah dengan metode 3R, dan pelatihan UP2K.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi melibatkan beberapa Instansi di Kota Semarang yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pertanian;
4. Dinas Ketahanan Pangan
5. Dinas Perikanan;
6. Dinas Pendidikan;

7. Dinas Perdagangan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perumahan dan Permukiman
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Kementerian Agama;
16. Balai Besar POM Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi, Perangkat daerah dikelompokkan ke dalam lima (5) pilar, sebagai berikut:

1. Perbaikan gizi masyarakat. Dinas yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kementerian Agama
2. Mutu dan keamanan pangan. Perangkat daerah yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan
3. Perilaku hidup bersih dan sehat. Perangkat Daerah yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Agama.
4. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Perangkat daerah yang terlibat dalam pilar kelima adalah Bappeda dan Sekretariat Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PG Kota Semarang Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan capaian masing-masing indikator program peningkatan pangan dan gizi. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian program/kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan; untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi program/kegiatan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan, memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan dan dampaknya.

1. Pemantauan

Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran, pemantauan memperhitungkan apa yang kita lakukan dan mengamati kualitas dari layanan yang telah diberikan. Pemantauan bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, terutama kebutuhan biaya, waktu kegiatan, personel dan peralatan yang dibutuhkan.

Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara lebih terperinci pemantauan yang dilaksanakan bertujuan untuk :

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- 2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- 3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;

- 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
- 5) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan hambatan selama kegiatan;
- 6) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- 7) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Pelaksanaan pemantauan program-program dalam RAD PG Kota Semarang melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pangan dan gizi di Kota Semarang.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kinerja suatu program. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program pembangunan. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah di lakukan.

Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (PD) yang terlibat dala pelaksanaan program pangan dan gizi secara multi sektor. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga/instansi diluar pemerintah

daerah, yaitu kalangan dunia usaha, perguruan tinggi (PT), lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk media massa. Evaluasi dari pihak eksternal diharapkan memberikan informasi atau penilaian hasil yang lebih obyektif. Obyektivitas evaluasi diperlukan bagi pengambilan kebijakan selanjutnya, terutama untuk penyusunan rencana program/ kegiatan pada tahun berikutnya.

Menurut Subarsono merinci beberapa tujuan dari evaluasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Dengan demikian diketahui bahwa evaluasi program dalam pelaksanaan RAD PG merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi tentang bekerjanya suatu program/kegiatan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya adalah dapat ditemukannya data/informasi pelaksanaan program/kegiatan di lapangan yang hasilnya bisa

positif ataupun negatif agar dapat menjadi masukan bagi pengembangan program/kegiatan selanjutnya. Dengan demikian maka dapat diketahui capaian kinerja program/kegiatan dengan membandingkan antara target capaian dengan realisasi pada akhir tahun atau akhir perencanaan. Disamping itu dalam pelaksanaan evaluasi dapat diketahui hambatan/kendala yang terjadi selama pelaksanaan program/kegiatan. Hasil identifikasi hambatan/kendala pelaksanaan program dapat menjadi masukan bagi perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dalam RAD PG Kota Semarang melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pangan dan gizi di Kota Semarang.

4.2 Indikator-Indikator Yang Dipantau dan Dievaluasi

Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat

No	Indikator	Instansi/OPD/ Pengampu Urusan
1	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita (%)	Dinas Kesehatan
4	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak dibawah dua tahun (%)	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan
6	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
7	Persentase Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan

Pilar 2 Aksesibilitas Pangan Beragam

No	Indikator	Instansi/OPD/ Pengampu Urusan
1	Tercapainya produksi padi (ton)	Dinas Pertanian
2	Tecapainya produksi jagung (ton)	Dinas Pertanian
3	Produksi daging sapi/kerbau (ton)	Dinas Pertanian
4	Produksi daging ayam buras (ton)	Dinas Pertanian

No	Indikator	Instansi/OPD/ Pengampu Urusan
5	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan (kawasan)	Dinas Ketahanan Pangan
6	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kelompok)	Dinas Ketahanan Pangan
7	Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (ton)	Dinas Ketahanan Pangan
8	Jumlah lumbung yang difasilitasi (lumbung)(kumulatif)	Dinas Ketahanan Pangan
9	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang terfasilitasi (kawasan) (komulatif)	Dinas Ketahanan Pangan
10	Konsumsi kalori mencapaikkal/kapita/hari (kkal/kap/th)	Dinas Ketahanan Pangan
11	Konsumsi Protein/Kap/hr(gram)	Dinas Ketahanan Pangan
12	Skor PPH	Dinas Ketahanan Pangan
13	Konsumsi energi(Kkal/Kp/hari)	Dinas Ketahanan Pangan
14	Rata-rata konsumsi ikan per kapita (Kg/Kap/Tahun)	Dinas Perikanan
15	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Dinas Perikanan
16	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Dinas Perikanan

Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan

No	Indikator	Instansi/SKPD/ Pengampu Urusan
1	Persentase pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Dinas Perdagangan
2	Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT (%)	BBPOM/Dinkes
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM (pilar / odf)	Dinas Kesehatan
4	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%)	Dinas Kesehatan
5	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (%)	Dinas Kesehatan
6	Presentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif	Dinas Dalduk KB
7	Presentase kelompok bina keluarga balita (BKB) aktif	Dinas Dalduk KB

Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Indikator	Instansi/SKPD/ Pengampu Urusan
1	Kebijakan kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah (%)	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Instansi/SKPD/ Pengampu Urusan
2	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	Dinas Kesehatan
3	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber PHBS) (%)	Dinas Kesehatan
4	Peningkatan mutu desa siaga - Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri (%)	Dinas Kesehatan
5	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	PDAM
6	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Jumlah kawasan SPAM masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikembangkan jaringannya	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Dinas Lingkungan Hidup

Pilar 5 Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

No	Indikator	Instansi/SKPD/ Pengampu Urusan
1	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (%)	Dindikcapil
2	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)	Dinas Kesehatan
3	Jumlah Koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan(DKP) dalam mendukung pangan gizi(Rakor)	Dinas Ketahanan Pangan

4.3 Waktu dan Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dua (2) kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing perangkat daerah. Sedangkan pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir tahun dan akhir perencanaan. Adapun mekanisme kerja evaluasi RAD PG adalah :

- a. Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen pemantauan dan evaluasi
- b. Menentukan waktu pemantauan dan evaluasi, tim dan lokasi.
- c. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan pihak eksternal dalam evaluasi.
- d. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

4.4 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pelaporan:

- a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun berikutnya
- d. Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

2. Mekanisme Pelaporan:

- a. Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Isi Laporan Laporan yang dikirimkan terkait Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RAD PG Kota Semarang, sebagai berikut:

a. Pendahuluan:

- 1) Latar Belakang
- 2) Tujuan

b. Pelaksanaan RAD-PG Kota Semarang.

- 1) Gambaran Proses Penyusunan RAD-PG (jika belum menyelesaikan dokumen RAD-PG)
- 2) Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
- 3) Gambaran Umum Program, Kegiatan, dan Pendanaan
- 4) Tantangan yang Dihadapi
- 5) Kegiatan Dalam Mengatasi Permasalahan dan Tantangan

c. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan

- 1) Rekomendasi
- 2) Rencana Tahun Depan

d. Lampiran :

- 1) Form Monev 2.1 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja RAD PG Kota Semarang.
- 2) Form Monev 2.2 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan RAD-PG Kota Semarang.
- 3) Surat Keputusan Waliota terkait RAD-PG Kota Semarang (apabila sudah tersedia cukup dilaporkan sekali)

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.1 :

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA RAD-PG TAHUN

PILAR	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja/ Keluaran	OPD	Target Tahun	Capaian Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Perbaikan Gizi Masyarakat					
II	Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam					
III	Mutu dan Keamanan Pangan					
IV	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
V	Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi					

2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.2:**PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAD-PG
TAHUN**

Pilar	OPD	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori*	Deskripsi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pilar 1: Perbaikan Gizi Masyarakat					
Pilar 2: Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam					
Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan					
Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi					

*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

3. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.3:**UMPAN BALIK PELAPORAN PELAKSANAAN RAD-PG**

Pilar	Hasil Analisa	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)
Pilar 1:Perbaikan Gizi Masyarakat		
Pilar 2:Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam		
Pilar 3:Mutu dan Keamanan Pangan		
Pilar 4:Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi		

4. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.4:

FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	JUMLAH DANA	HASIL	TANTANGAN	KET

BAB V

PENUTUP

RAD PG Kota Semarang Tahun 2020 - 2024 merupakan perencanaan strategis dalam mencapai target-target pengembangan pangan dan gizi di Kota Semarang dan mendukung bagi pencapaian target nasional. RAD-PG Kota Semarang selanjutnya akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik rencana pembangunan jangka menengah yaitu RPJMD Kota Semarang yang akan datang dan Renstra PD, maupun jangka pendek/tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang dan Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahun anggaran sampai dengan tahun 2024.

Pelaksanaan RAD PG Kota Semarang ini secara sinergis memerlukan dukungan multi sektoral baik dari segenap organisasi perangkat daerah Kota Semarang, alangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan partisipasi masyarakat pada umumnya. Demikian pula sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang serta tanggung jawaban sosial dunia usaha dan swadaya masyarakat.

RAD PG Kota Semarang merupakan rencana aksi multisektor tentang peningkatan pangan dan gizi, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pentingnya transformasi dalam perangkat daerah, melalui sinergi kerjasama dalam menyelesaikan masalah pangan dan gizi diperlukan kontribusi berbagai pihak, tidak cukup bersifat OPD sektoral saja tetapi harus diselesaikan secara multisektor dengan melibatkan kalang dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, kelompok-kelompok masyarakat dan partisipasi masyarakat.
2. Pentingnya transformasi dalam sosial budaya masyarakat. Kebijakan RAD PG dilaksanakan melalui kerjasama, kerelawanan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sasaran, terutama kelompok-kelompok masyarakat dalam budidaya, mengolah dan pengawetan pangan, dan rpomosi pemanfaatan potensi pangan lokal yang belum optimal (bela-beli produk Kota Semarang, promosi pangan beragam, peningkatan pengolahan sayuran dan buah-buahan yang mudah rusak dengan

teknologi tepat guna (TTG) menjadi bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas).

3. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan RAD PG Kota Semarang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Meningkatkan transformasi perilaku masyarakat Kota Semarang agar meningkatkan PHBS, pentingnya meningkatkan pangan dan gizi dalam mencegah stunting, gizi kurang serta dampaknya pada meningkatnya jumlah penderita penyakit degeneratif.

Agar pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kota Semarang dapat memberikan hasil yang optimal maka dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahunnya, supaya apa yang menjadi target dalam rencana peningkatan pangan dan gizi kinerjanya semakin baik, permasalahan yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan dapat diselesaikan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan pihak internal (perangkat daerah terkait) dan pihak eksternal yaitu : kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok swadaya yang ada).

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI